



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR: 646 /KPTS/M/2014  
TENTANG**

**PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK  
(E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 515/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
  - b. bahwa dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, terkait dengan perubahan struktur organisasi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka susunan ULP yang sudah terbentuk perlu disempurnakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/PRT/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011.

**Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*E-Procurement*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2013.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**KESATU** : Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. ULP Kantor Pusat; dan
- b. ULP Wilayah.

**KEDUA** : a. ULP Kantor Pusat ditetapkan sebagai berikut:

- 1) ULP Pusat 1 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa satminkal Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Wilayah, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ditempatkan pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Kepala : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan Umum

- 2) ULP Pusat 2 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Satminkal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan ditempatkan pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Kepala : Kepala Pusat

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha

b. ULP Wilayah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) **ULP Sumatera Utara** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sumatera Utara ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (Medan).

Kepala : Kepala Balai Besar

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha

- 2) **ULP Nanggroe Aceh Darussalam** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera I (Banda Aceh).

Kepala : Kepala Balai

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 3) **ULP Jambi** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Jambi ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (Jambi).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 4) **ULP Kepulauan Riau** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kepulauan Riau ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera IV (Batam).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 5) **ULP Riau** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Riau ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera III (Pekanbaru).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 6) **ULP Sumatera Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sumatera Barat ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera V (Padang).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 7) **ULP Bengkulu** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Bengkulu ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sumatera VII (Bengkulu).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 8) **ULP Kepulauan Bangka Belitung** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Palembang).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 9) **ULP Lampung** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Lampung ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (Bandar Lampung).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 10) **ULP Sumatera Selatan** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sumatera Selatan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III (Palembang).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha

- 11) **ULP DKI Jakarta** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi DKI Jakarta ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (Jakarta).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 12) **ULP Banten** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Banten ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (Serang).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 13) **ULP Jawa Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Jawa Barat ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (Bandung).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 14) **ULP D.I. Yogyakarta** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi D.I. Yogyakarta ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (Yogyakarta).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 15) **ULP Jawa Tengah** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Jawa Tengah ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (Surakarta).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 16) **ULP Jawa Timur** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Jawa Timur ditempatkan pada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (Surabaya).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 17) **ULP Sulawesi Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sulawesi Barat ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (Makassar).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 18) **ULP Sulawesi Selatan** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sulawesi Selatan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (Makassar).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha

- 19) **ULP Sulawesi Tengah** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sulawesi Tengah ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (Palu).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 20) **ULP Sulawesi Tenggara** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sulawesi Tenggara ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (Kendari).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 21) **ULP Kalimantan Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kalimantan Barat ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan I (Pontianak).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 22) **ULP Kalimantan Selatan** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kalimantan Selatan ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Banjarasin).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 23) **ULP Kalimantan Tengah** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kalimantan Tengah ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (Kuala Kapuas).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 24) **ULP Kalimantan Timur** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kalimantan Timur ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 25) **ULP Kalimantan Utara** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Kalimantan Utara ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Samarinda).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 26) **ULP Bali** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Bali ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Bali – Penida (Denpasar).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- 27) **ULP Nusa Tenggara Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (Mataram).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 28) **ULP Nusa Tenggara Timur** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (Kupang).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 29) **ULP Maluku** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Maluku ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku (Ambon).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 30) **ULP Maluku Utara** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Maluku Utara ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Maluku Utara (Ternate).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 31) **ULP Papua** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Papua ditempatkan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X (Jayapura).  
Kepala : Kepala Balai Besar  
Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha
- 32) **ULP Papua Barat** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Papua Barat ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Papua Barat (Manokwari).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 33) **ULP Sulawesi Utara** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Sulawesi Utara ditempatkan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI (Manado).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 34) **ULP Gorontalo** untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa seluruh satminkal di Provinsi Gorontalo ditempatkan pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi II (Gorontalo).  
Kepala : Kepala Balai  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

### KETIGA

: Tugas Pokok dan wewenang ULP meliputi:

a. Kepala ULP:

- 1) Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
- 2) Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
- 3) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
- 4) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri;
- 5) Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
- 6) Menugaskan/ menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan
- 7) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

b. Sekretaris ULP:

- 1) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
- 2) Menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
- 3) Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
- 5) Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
- 6) Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- 7) Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
- 8) Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 9) Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa

### KEEMPAT

: Kelengkapan organisasi ULP/Staf pendukung ditetapkan oleh Kepala ULP

### KELIMA

: Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik (*e-procurement*) berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/SE/M/2013.

### KEENAM

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 515/KPTS/M/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### KETUJUH

: Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang ditugaskan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, harus ditetapkan kembali oleh ULP sesuai Keputusan Menteri ini.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satminkal terkait yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 22 Desember 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat;

**LAMPIRAN**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 646 /KPTS/M/2014

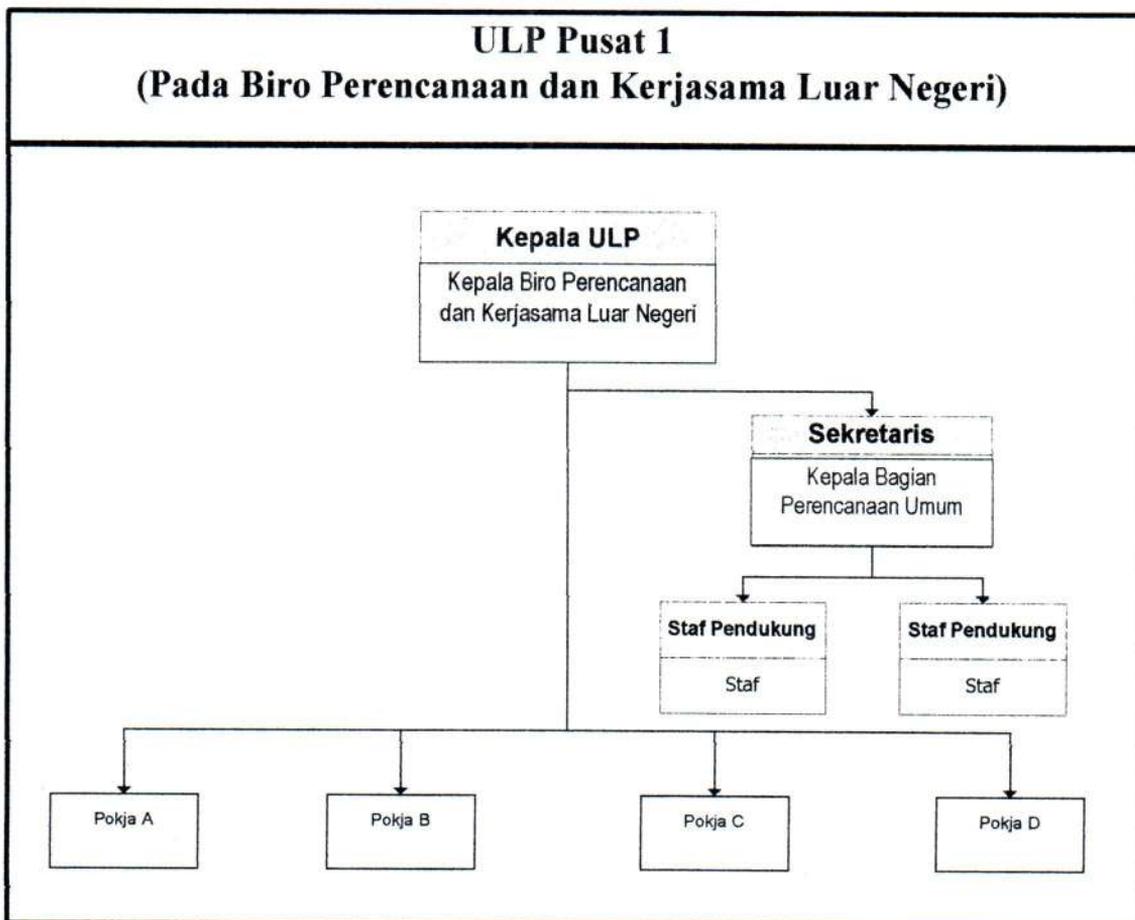
TENTANG

PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
(ULP) DAN PELAKSANAAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA  
ELEKTRONIK (*E-PROCUREMENT*) DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

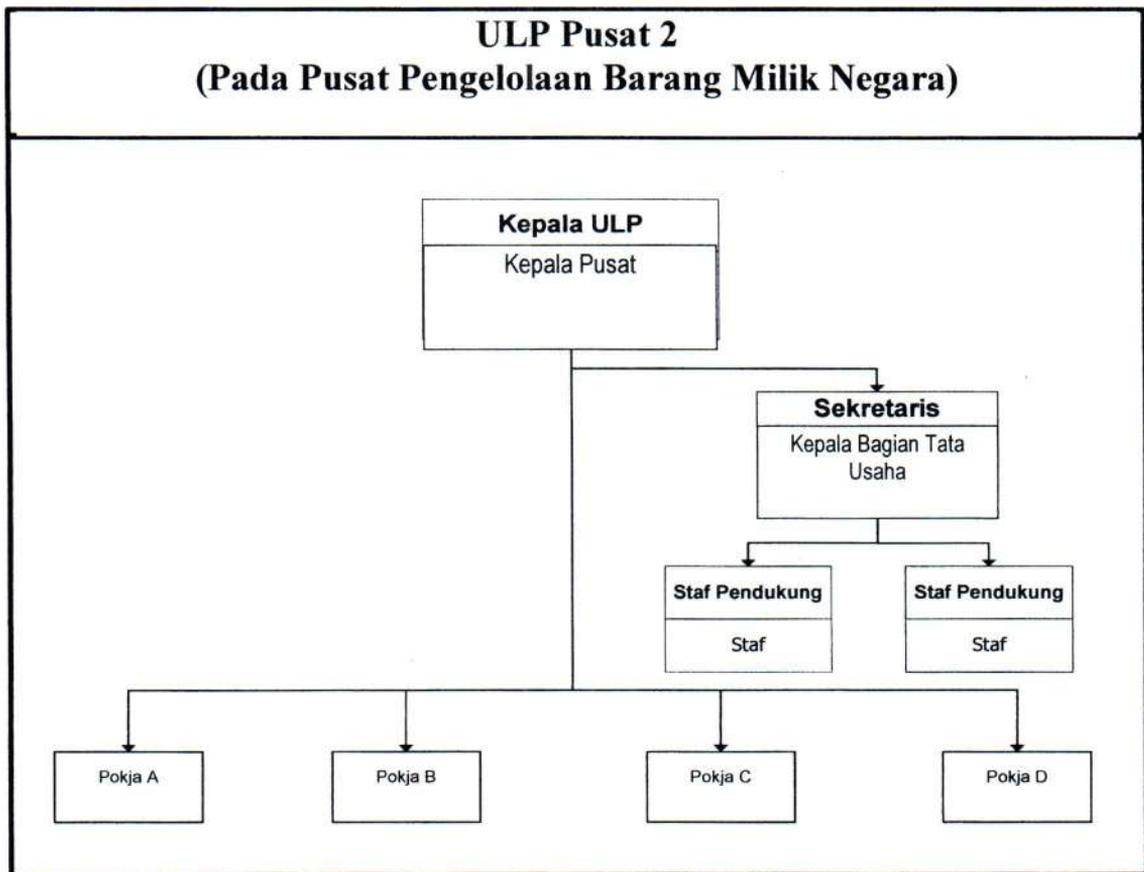
**STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**a. Kantor Pusat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

1. ULP Pusat 1

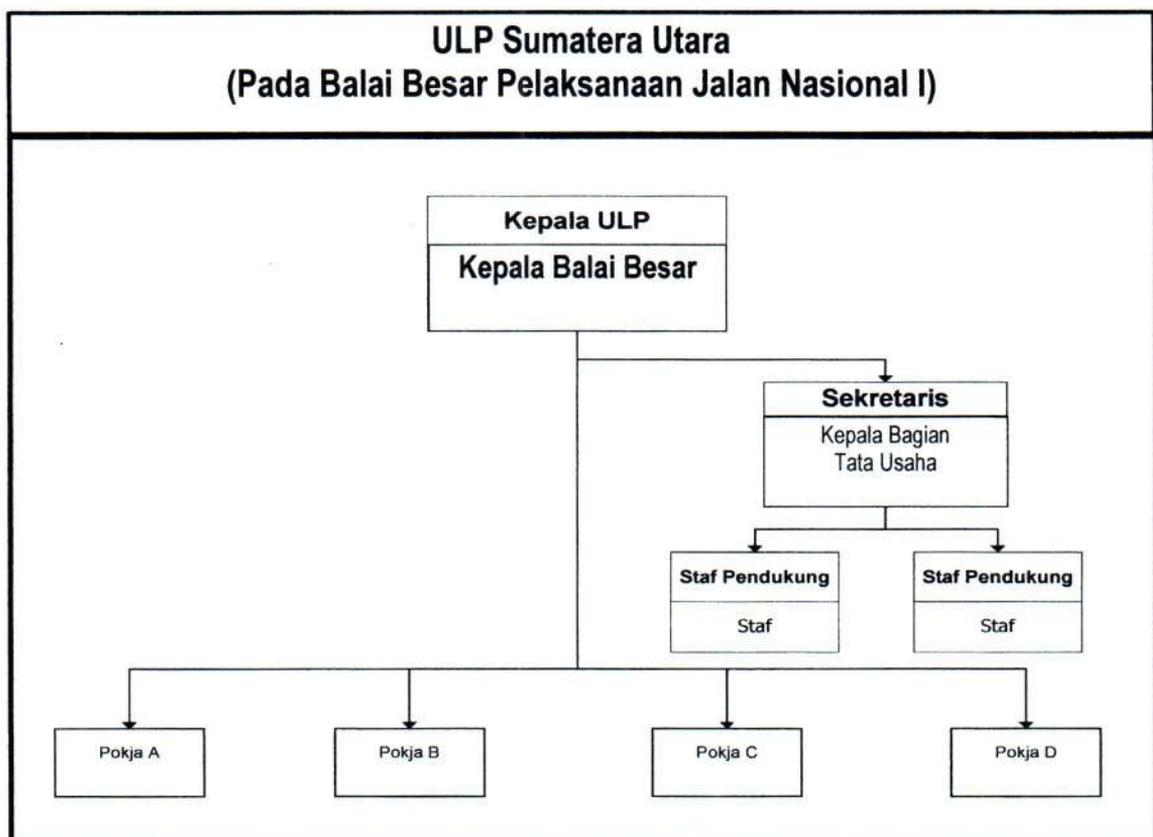


2. ULP Pusat 2

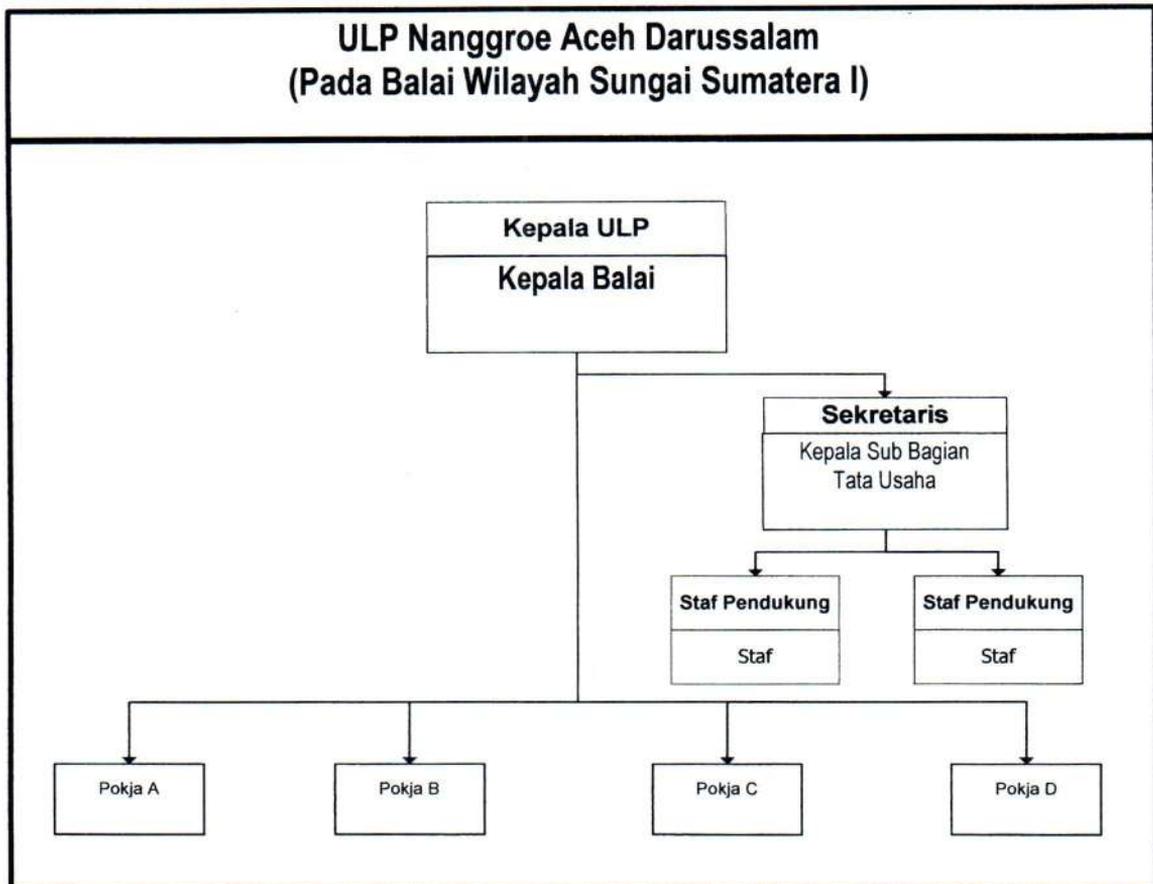


**b. ULP Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

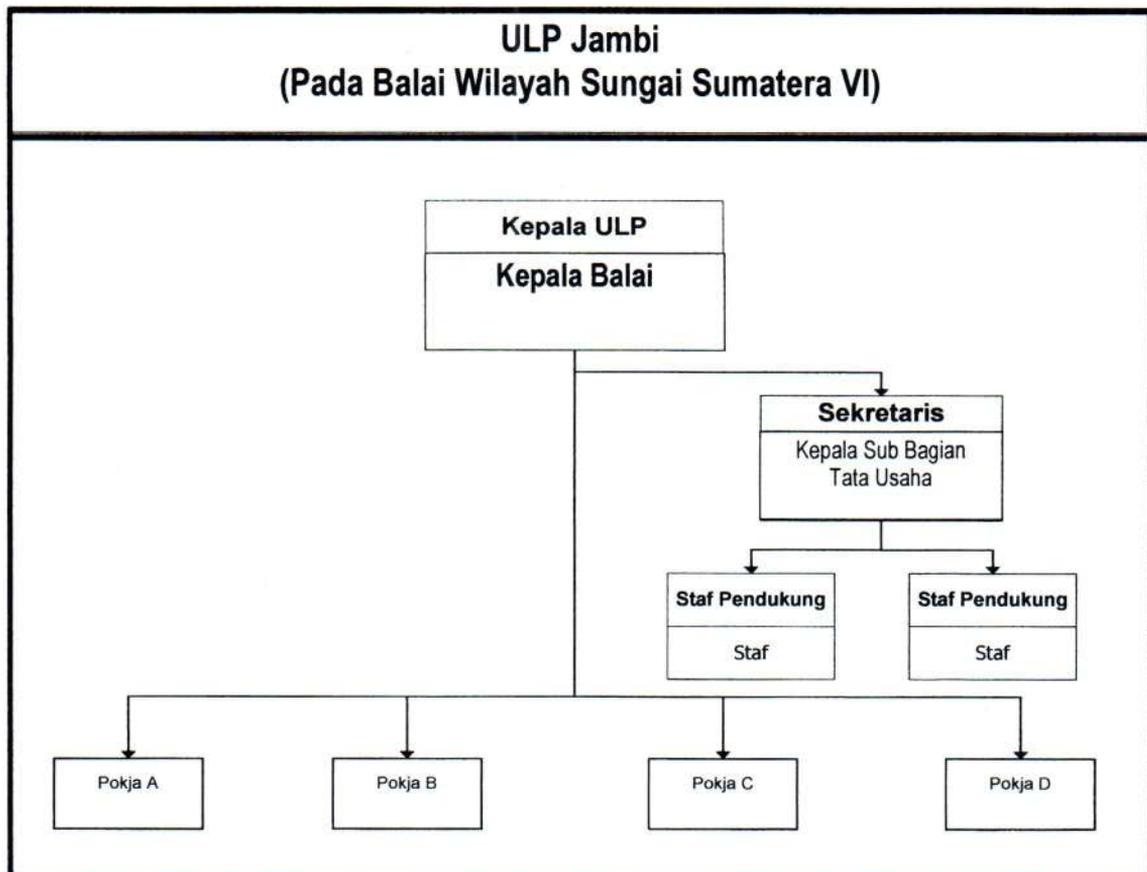
1. ULP Sumatera Utara



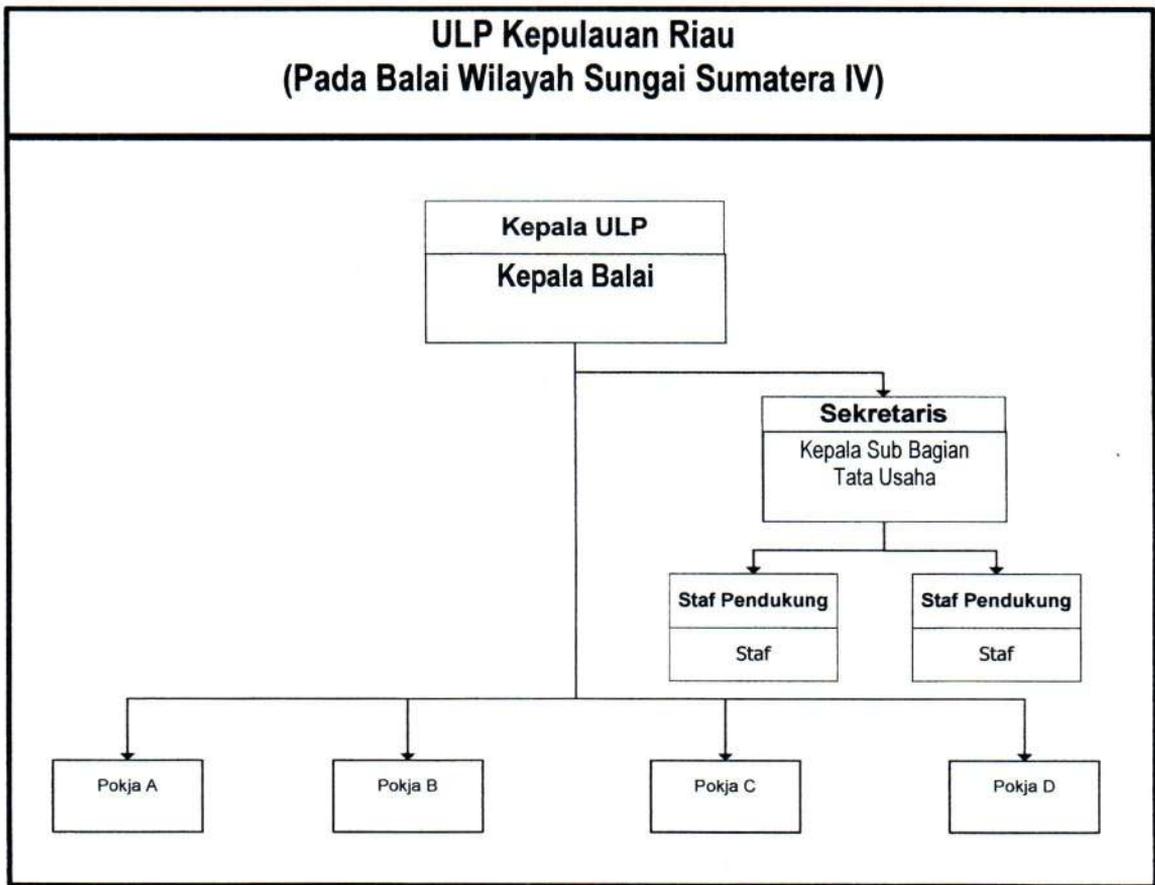
2. ULP Nanggroe Aceh Darussalam



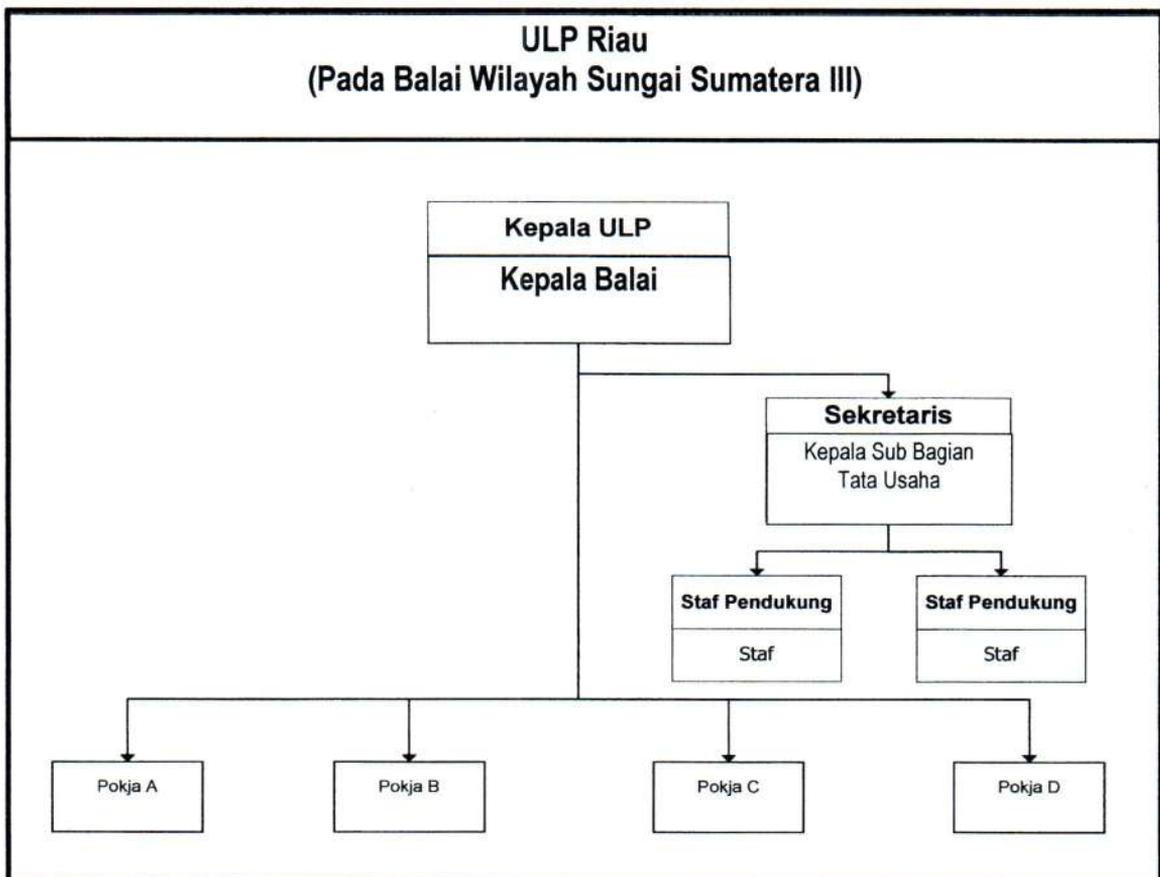
3. ULP Jambi



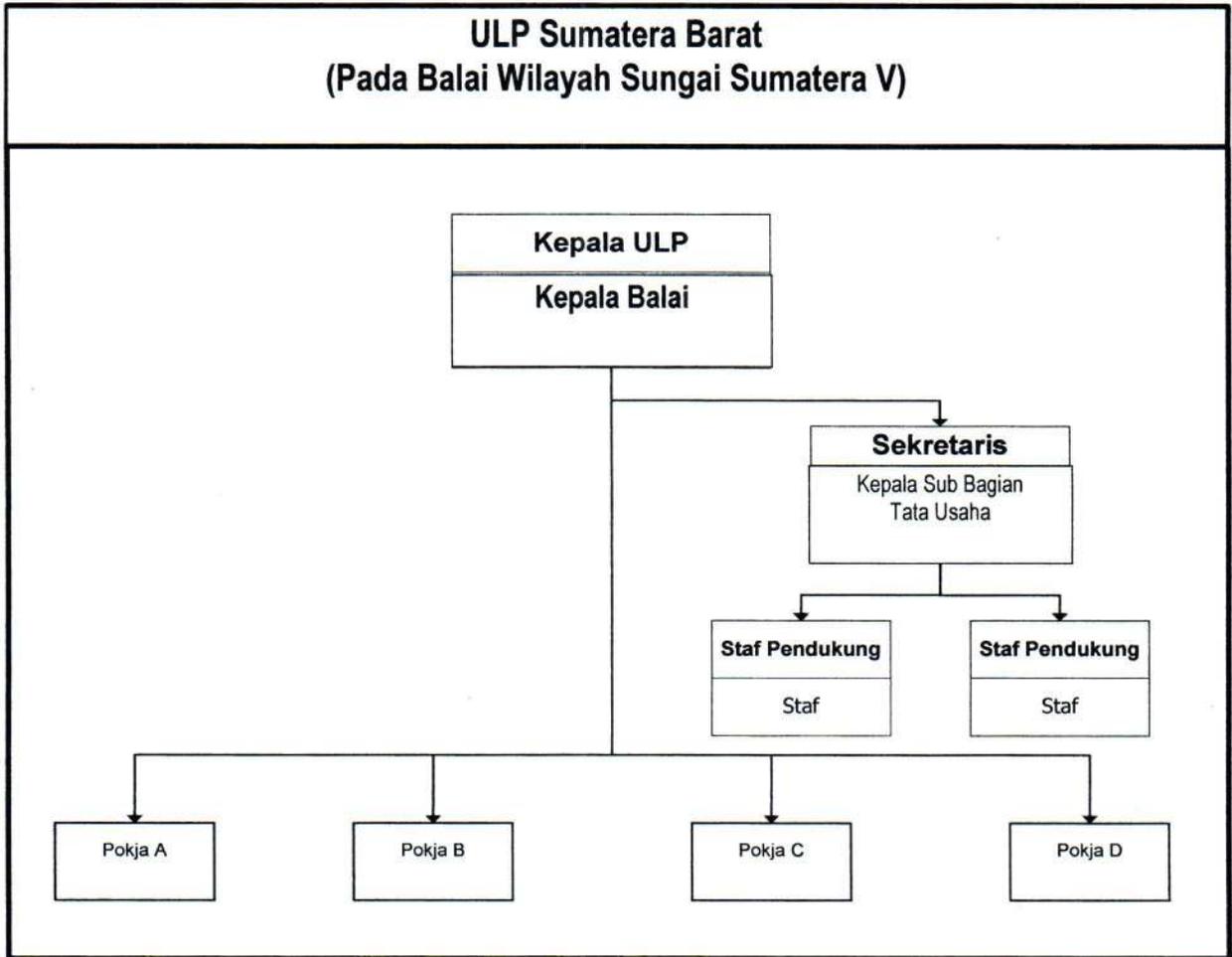
#### 4. ULP Kepulauan Riau



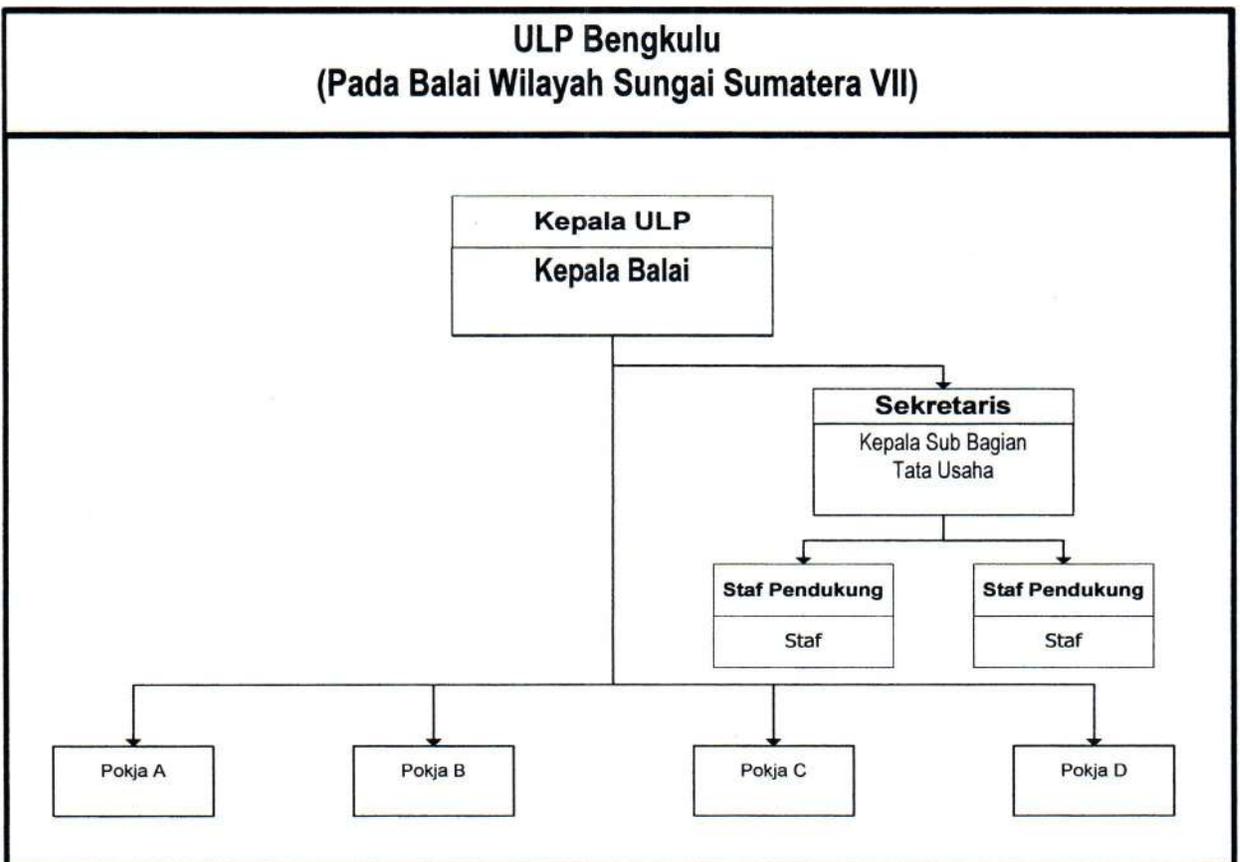
#### 5. ULP Riau



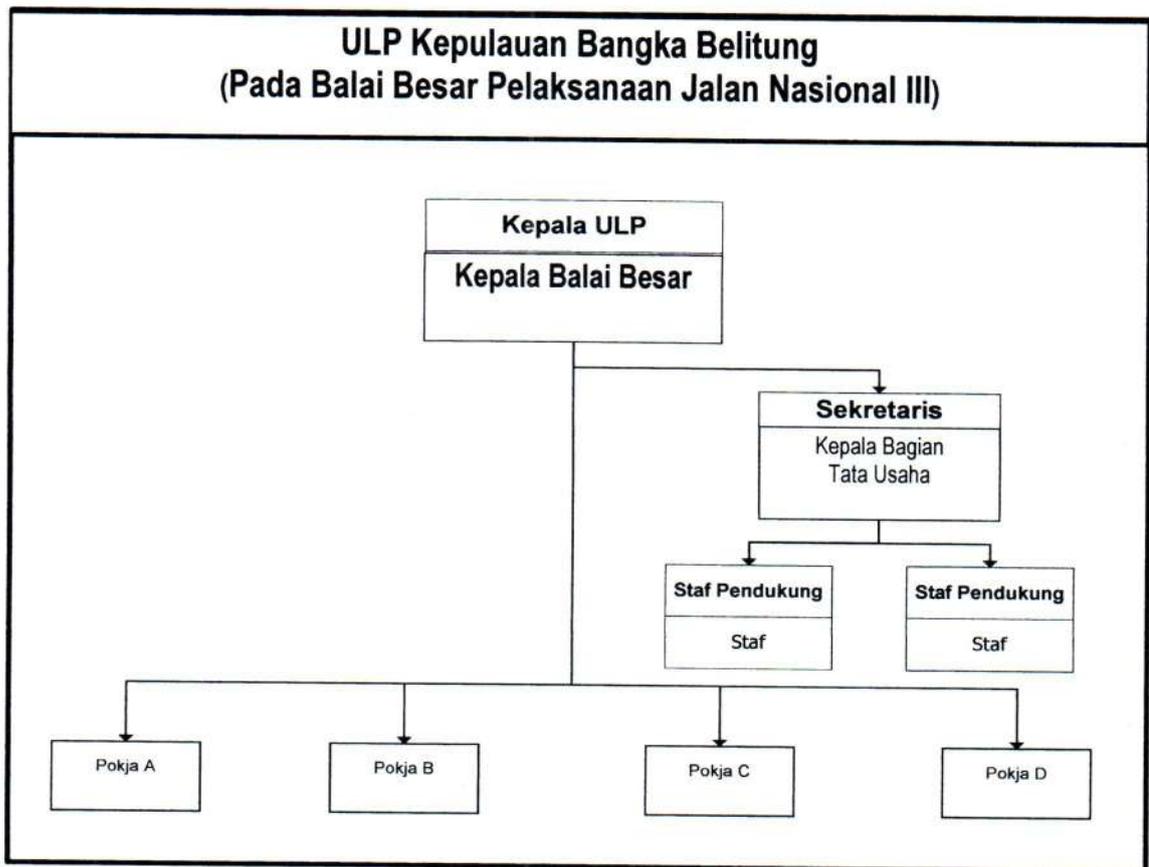
6. ULP Sumatera Barat



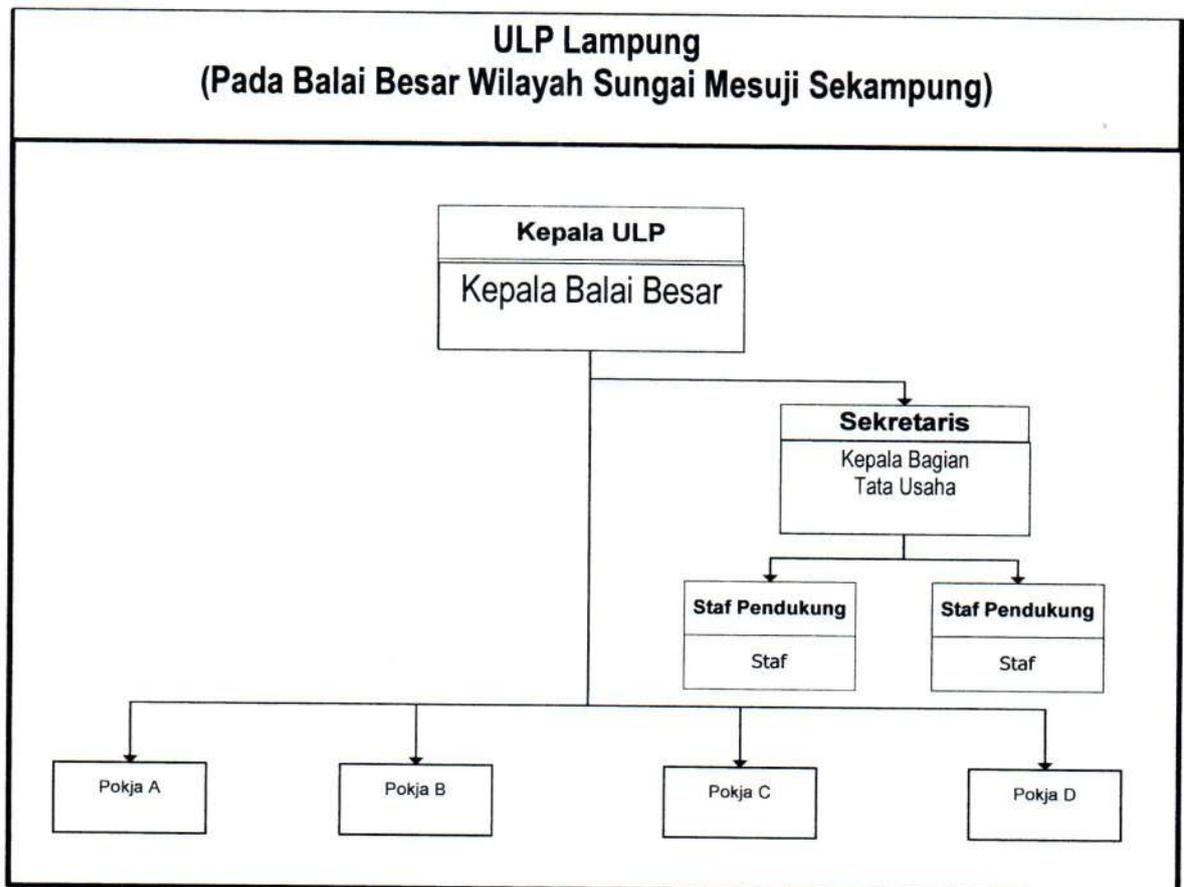
7. ULP Bengkulu



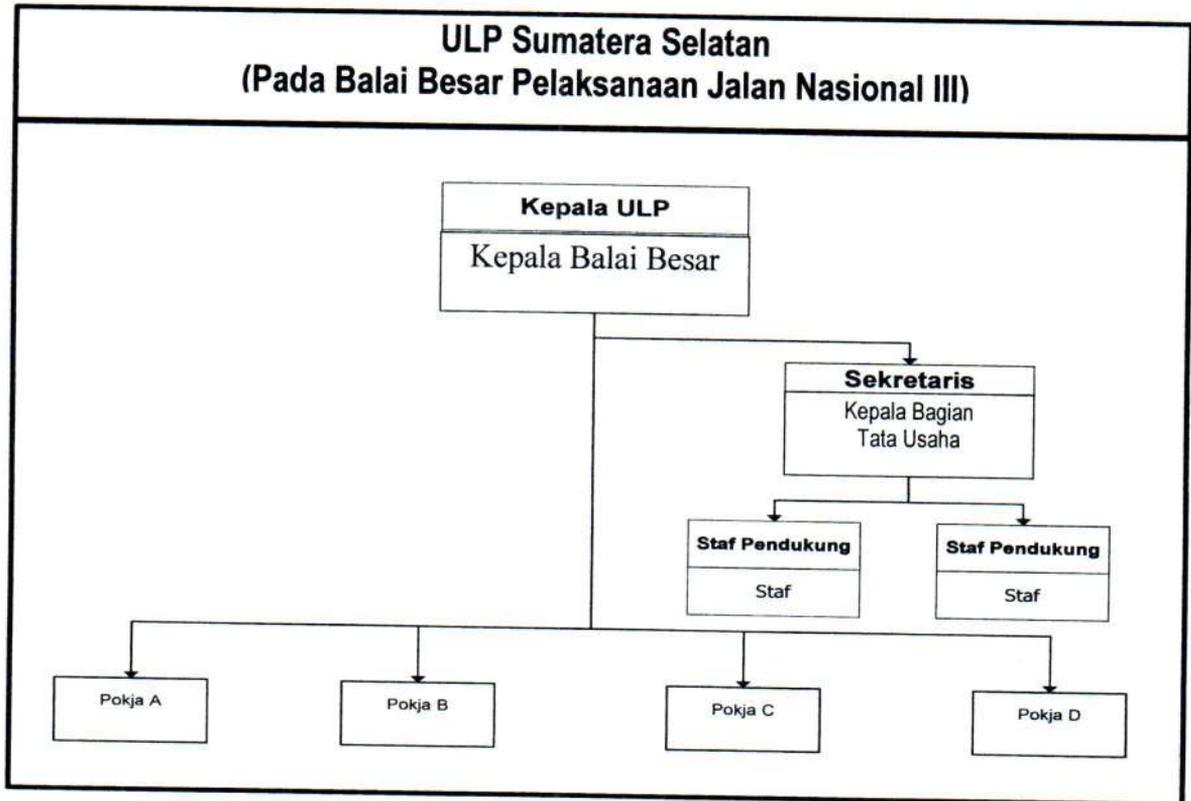
8. ULP Kepulauan Bangka Belitung



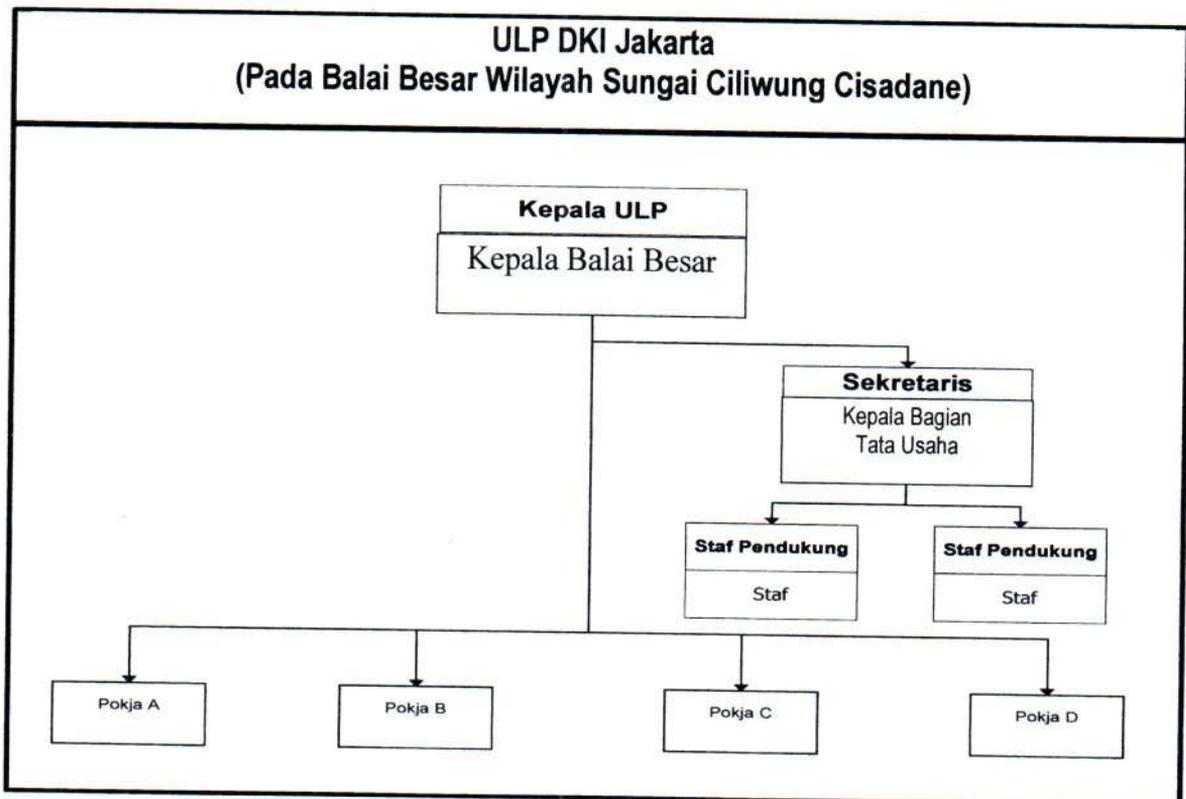
9. ULP Lampung



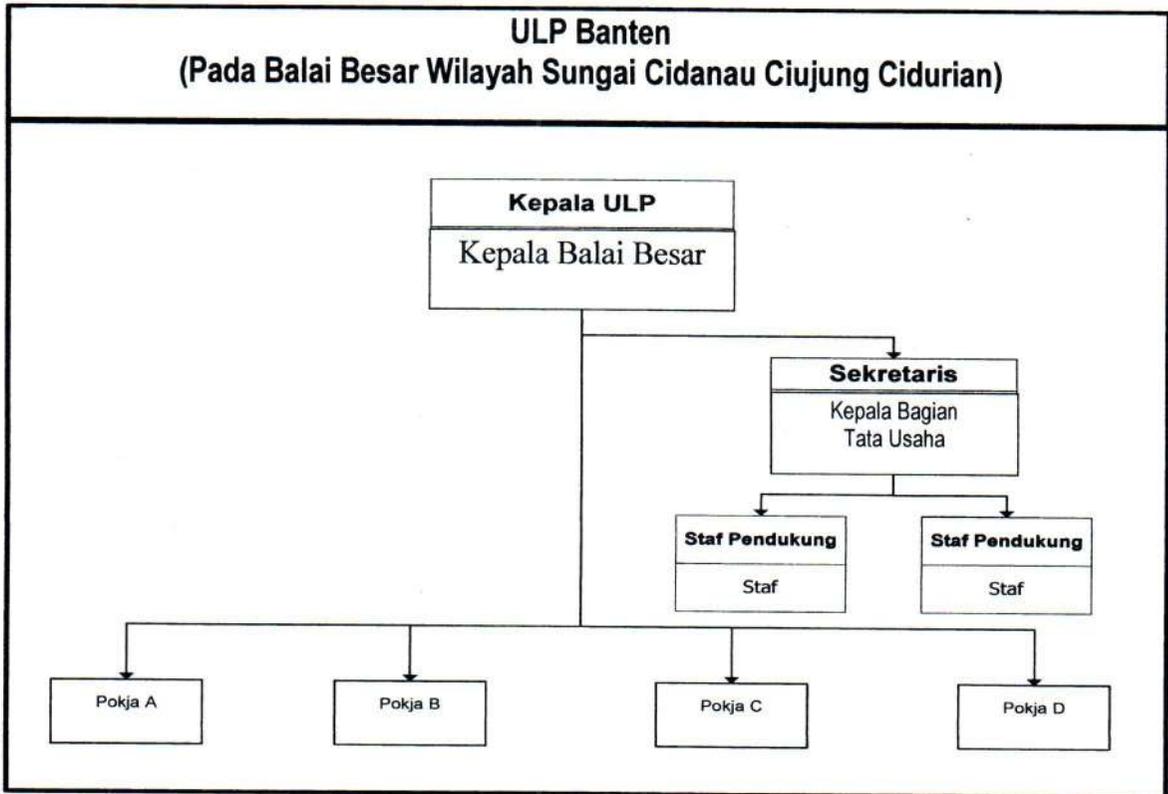
10. ULP Sumatera Selatan



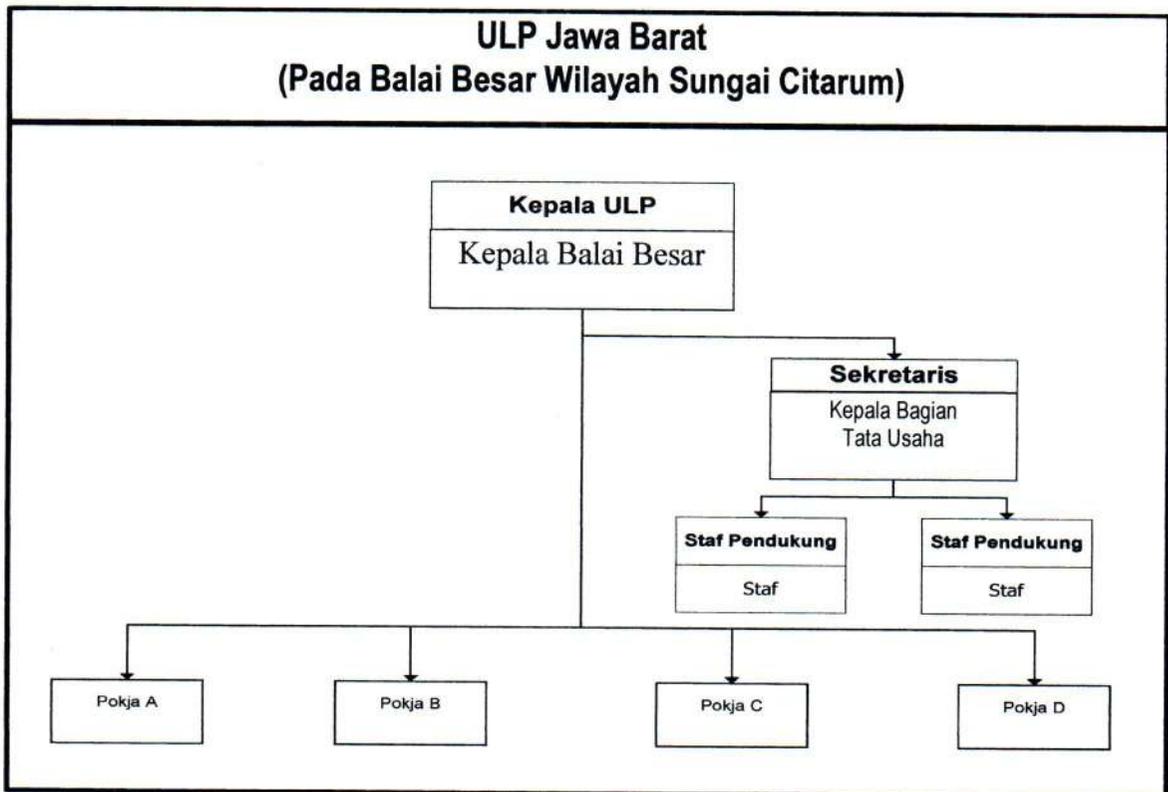
11. ULP DKI Jakarta



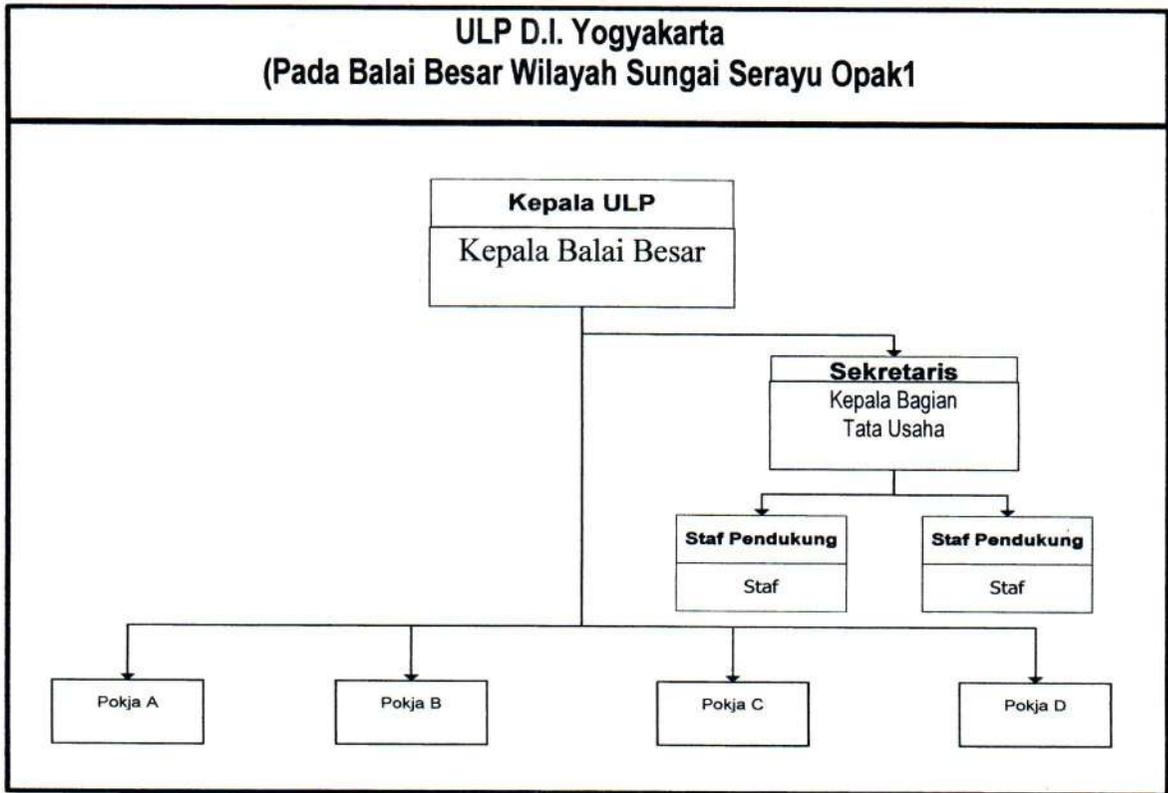
12. ULP Banten



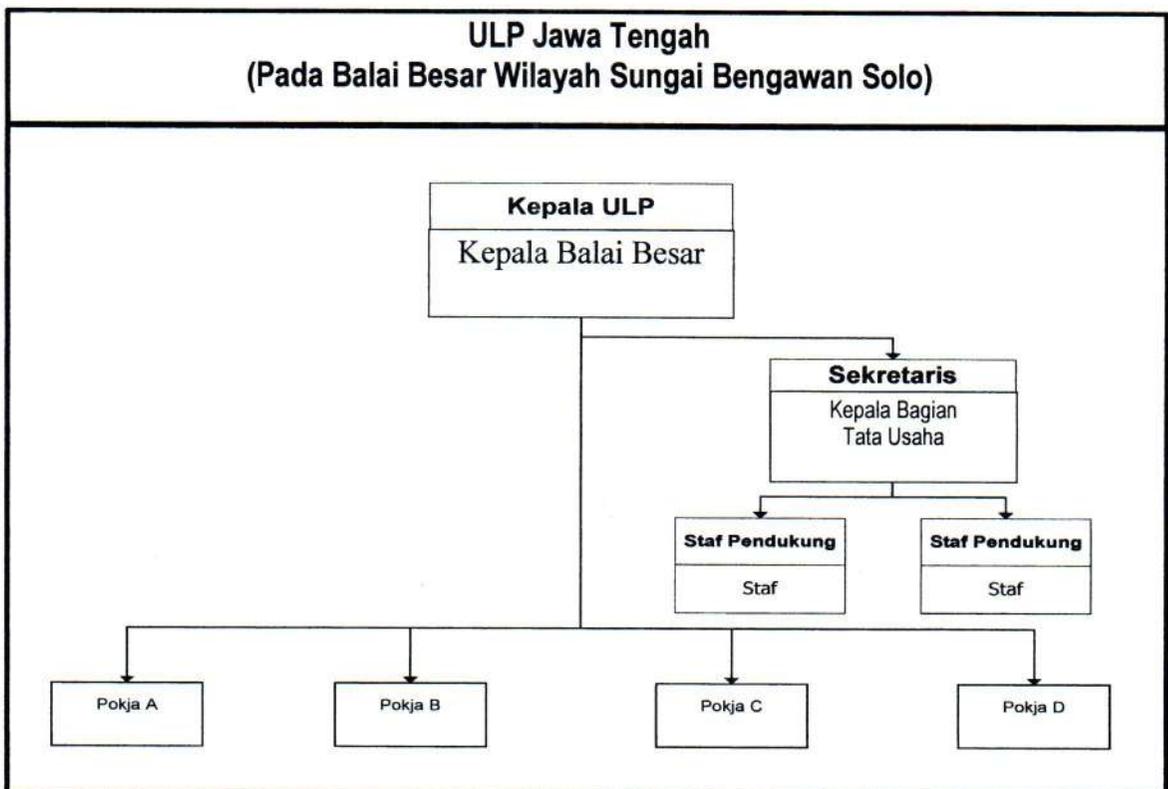
13. ULP Jawa Barat



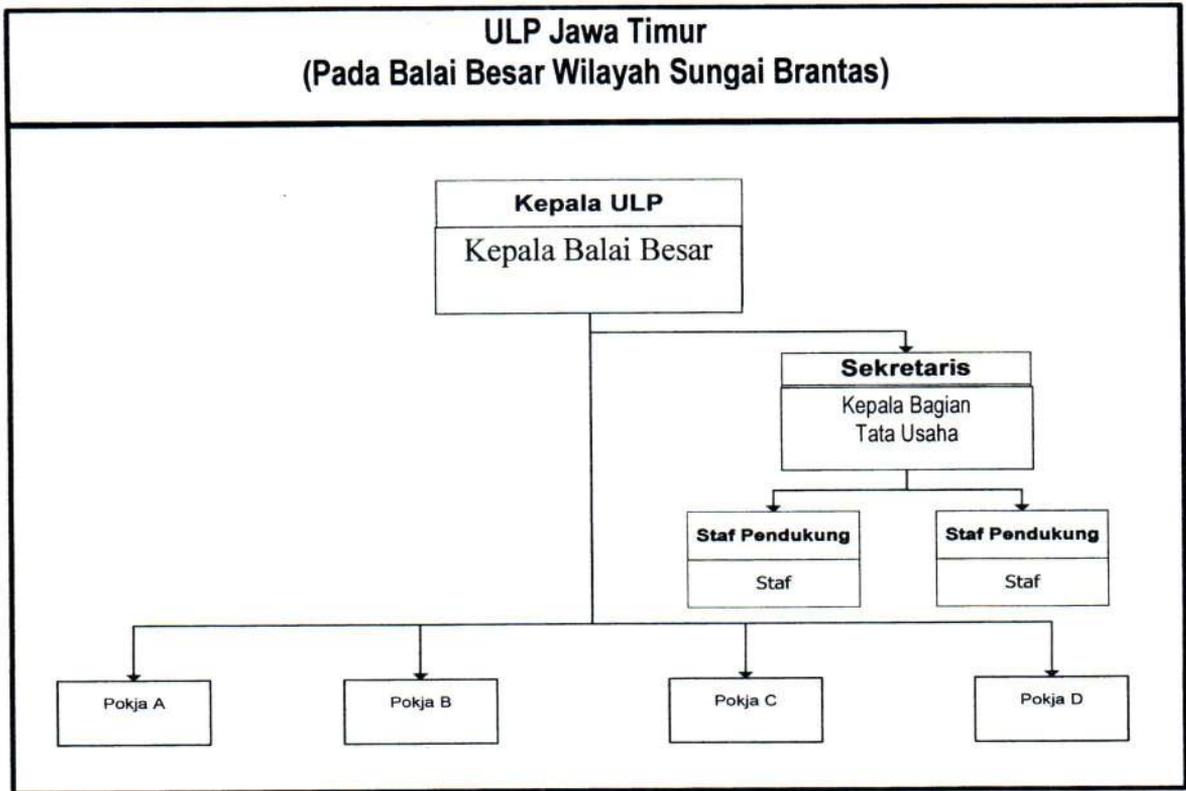
14. ULP D.I. Yogyakarta



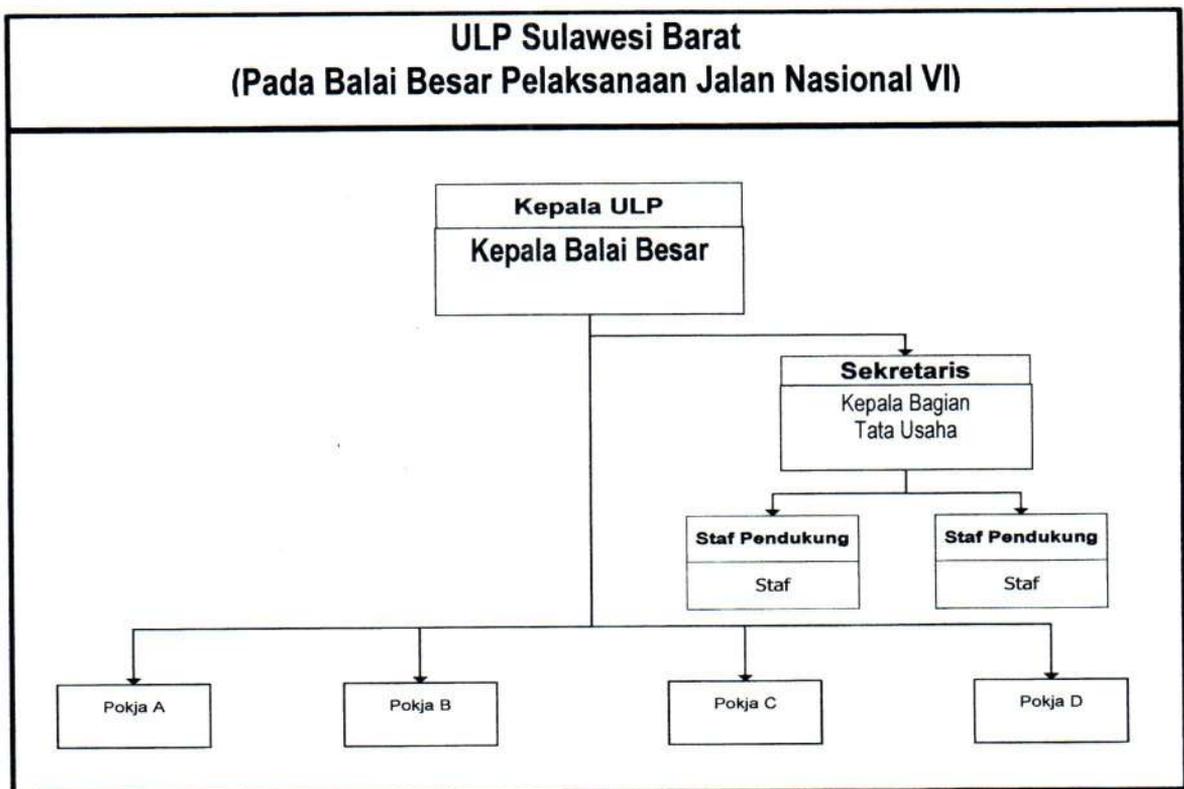
15. ULP Jawa Tengah



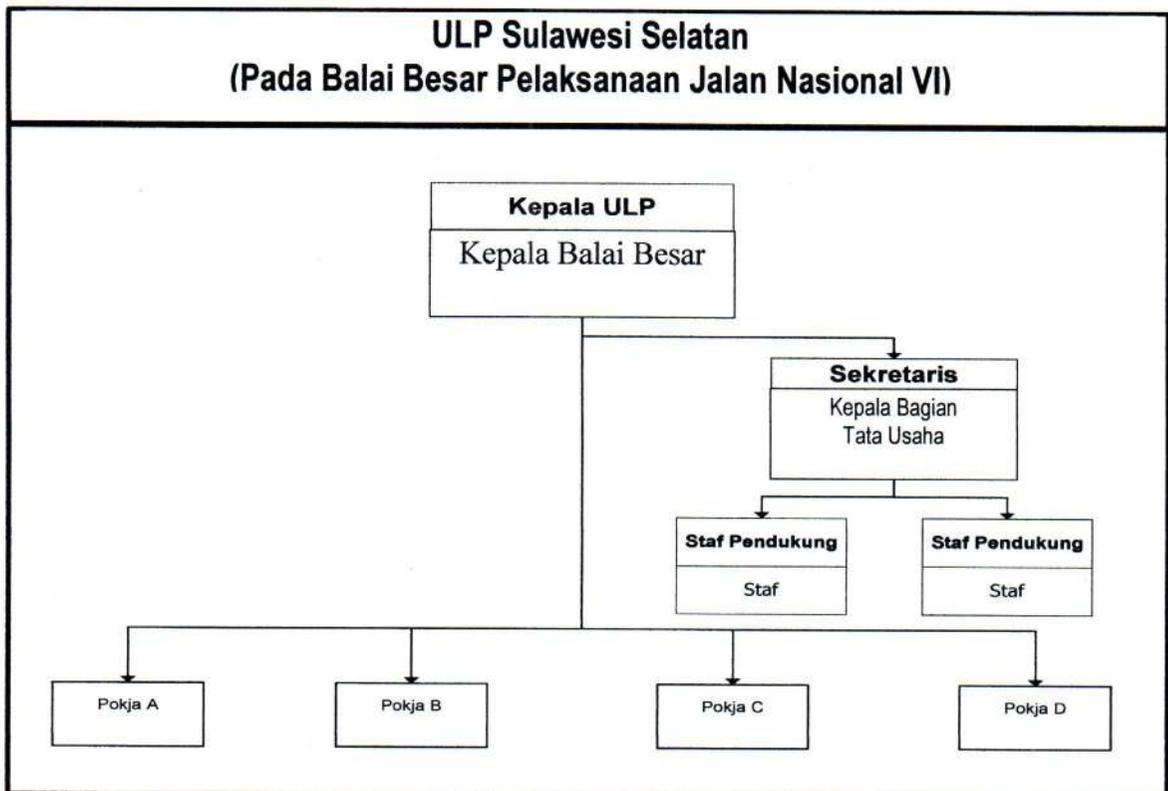
16. ULP Jawa Timur



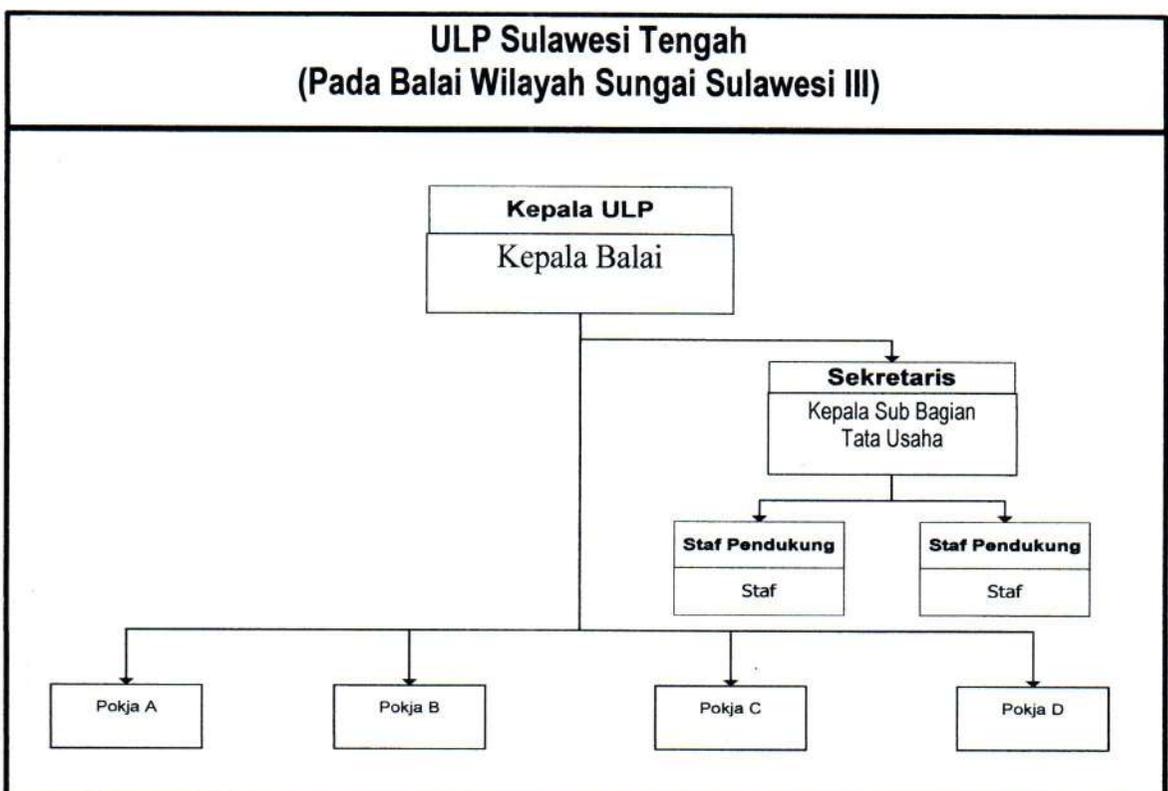
17. ULP Sulawesi Barat



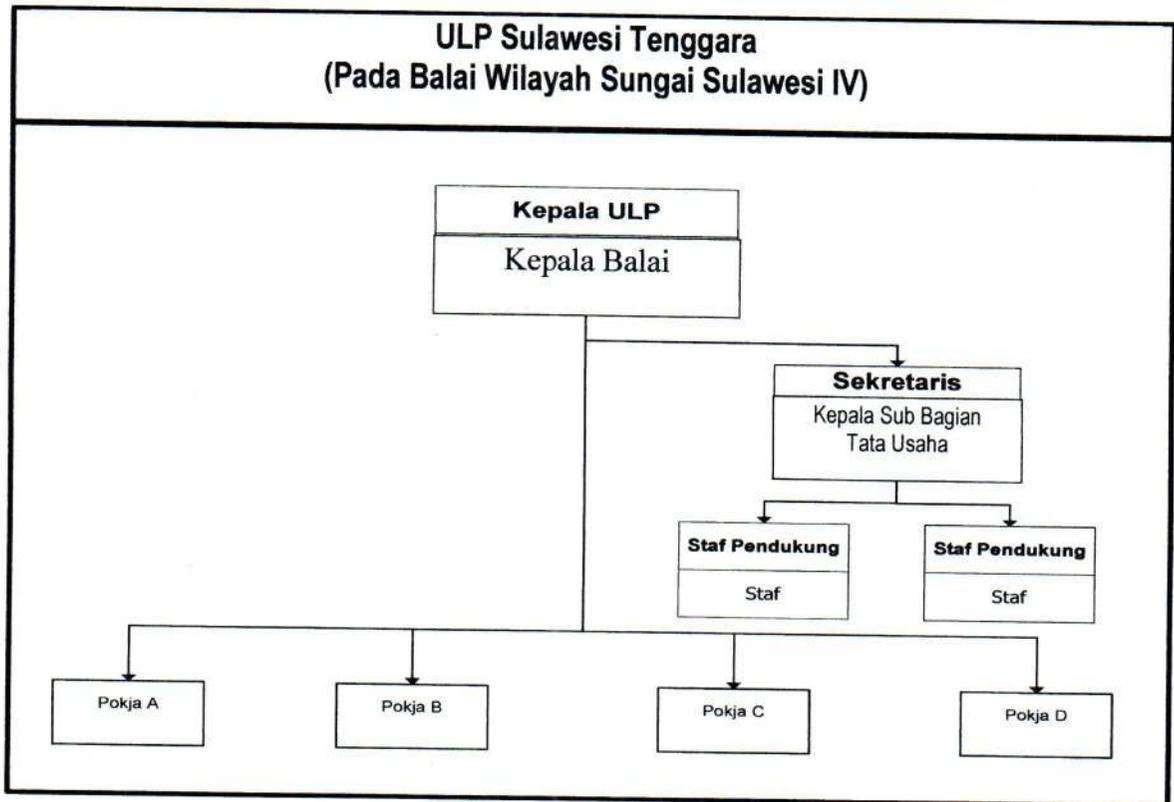
18. ULP Sulawesi Selatan



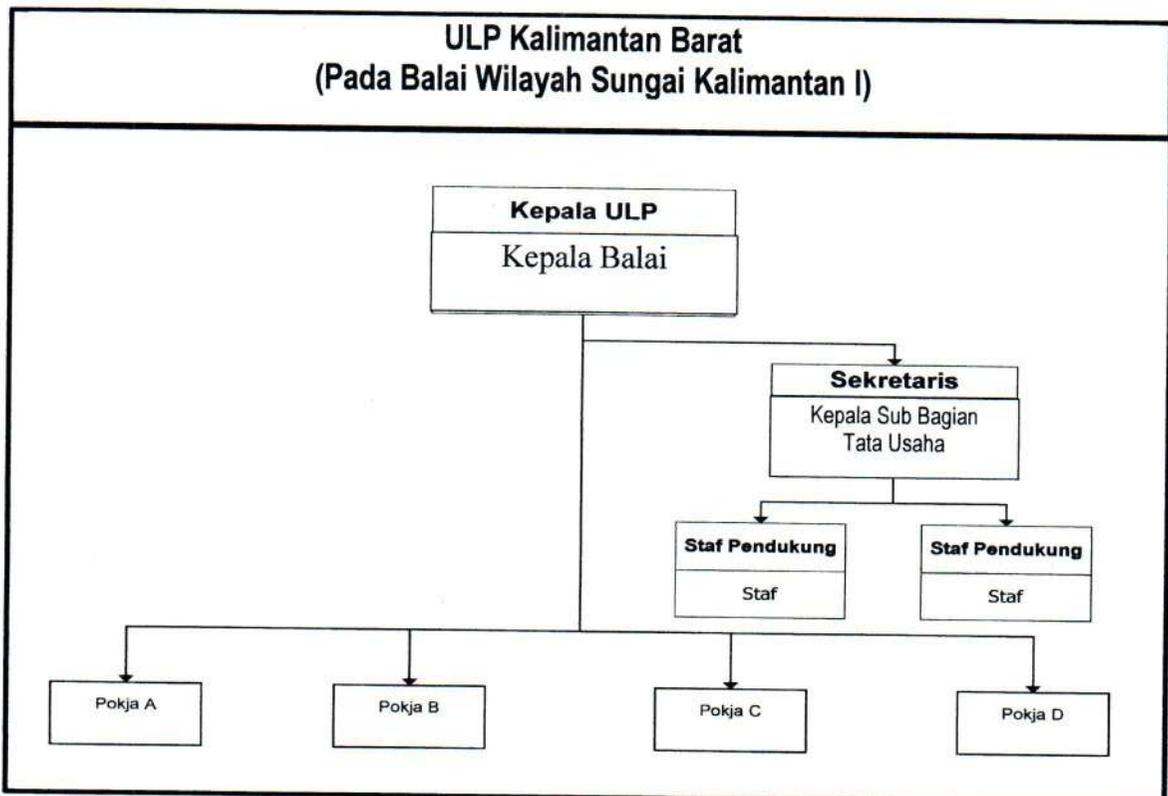
19. ULP Sulawesi Tengah



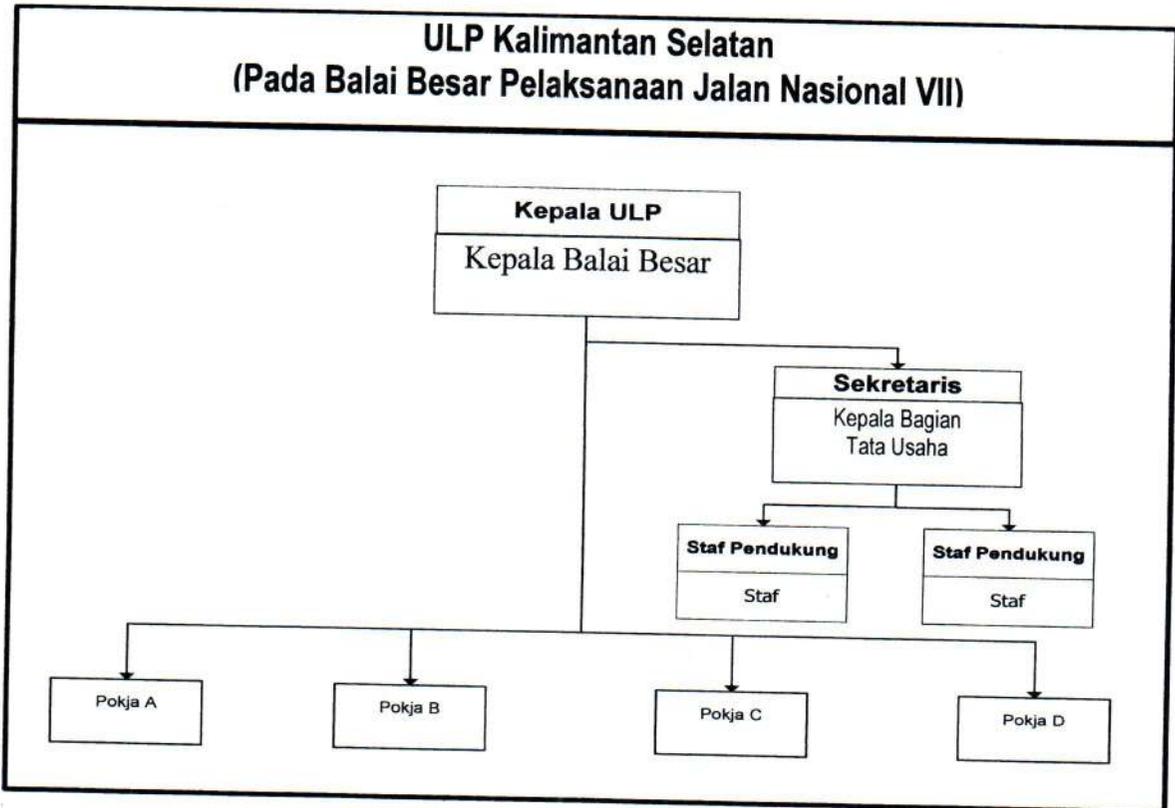
20. ULP Sulawesi Tenggara



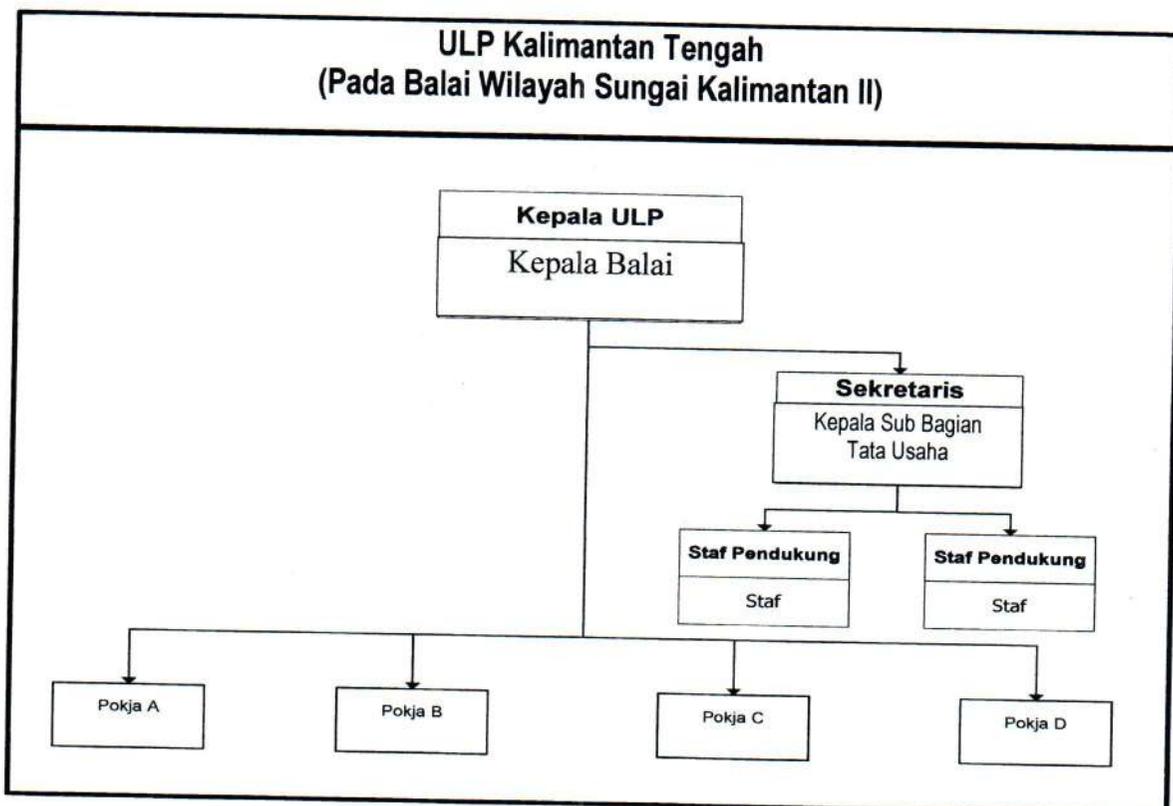
21. ULP Kalimantan Barat



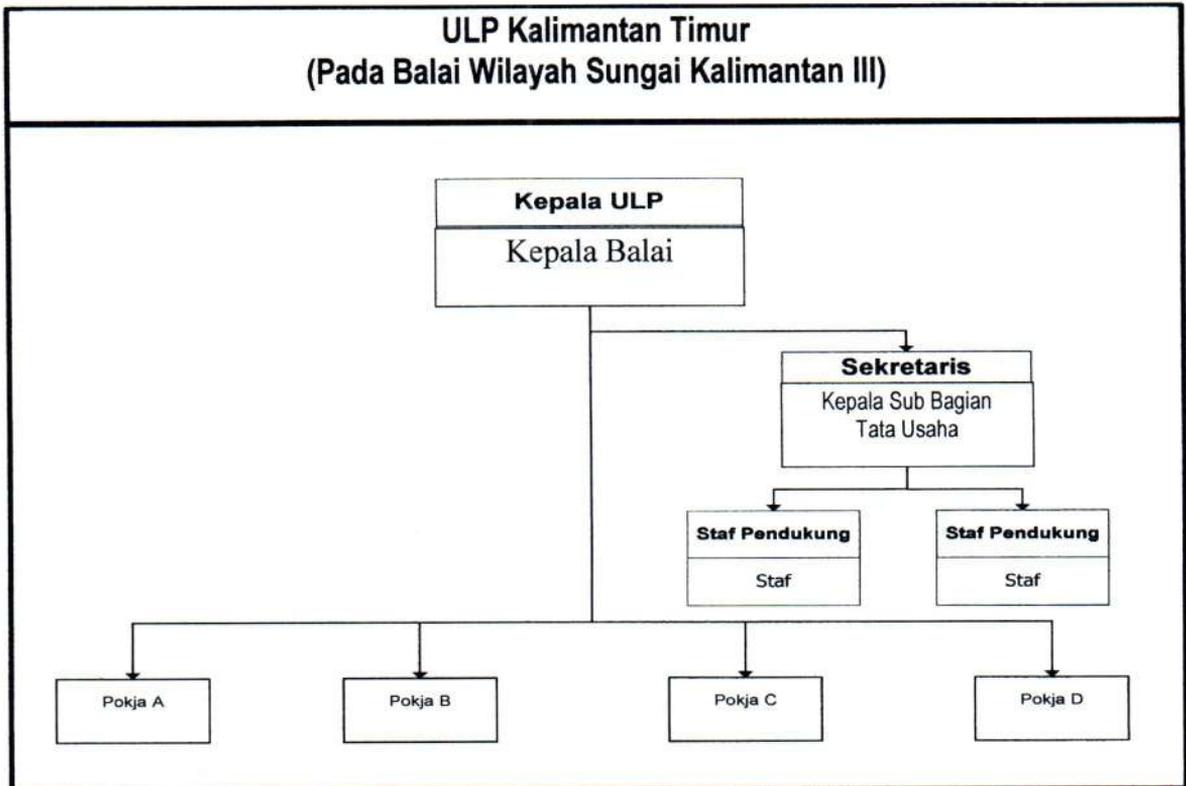
22. ULP Kalimantan Selatan



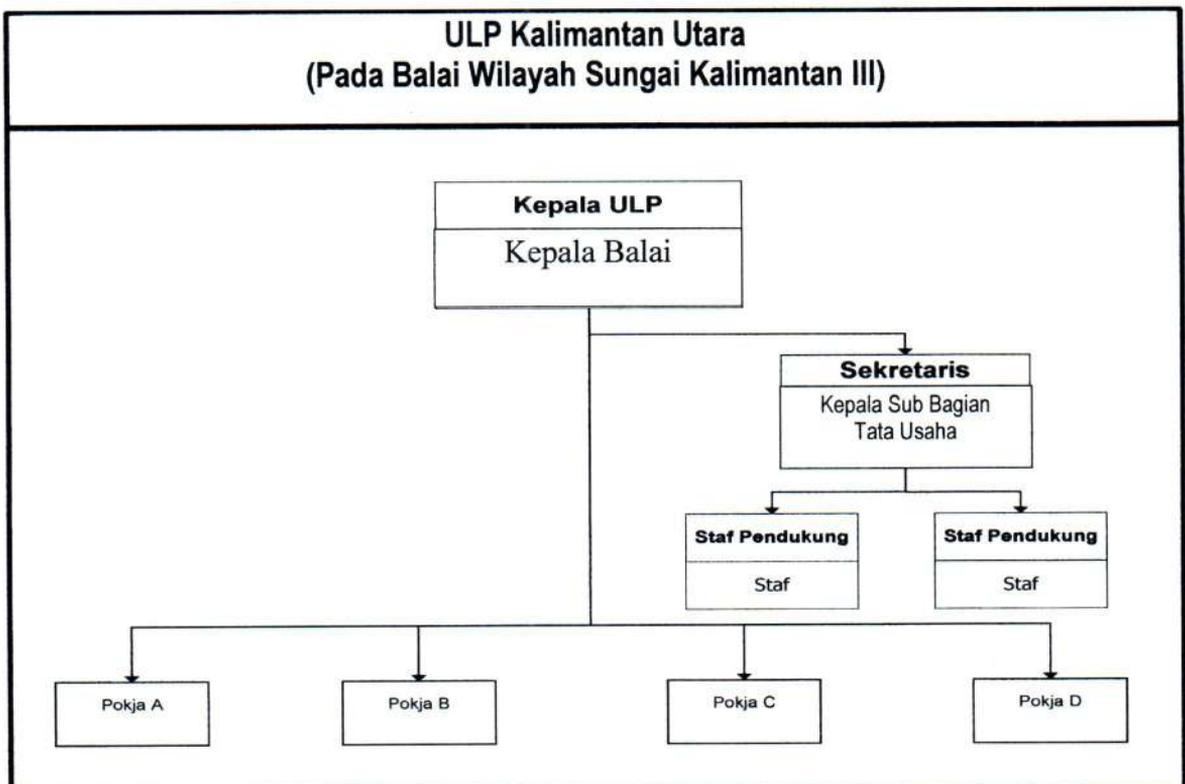
23. ULP Kalimantan Tengah



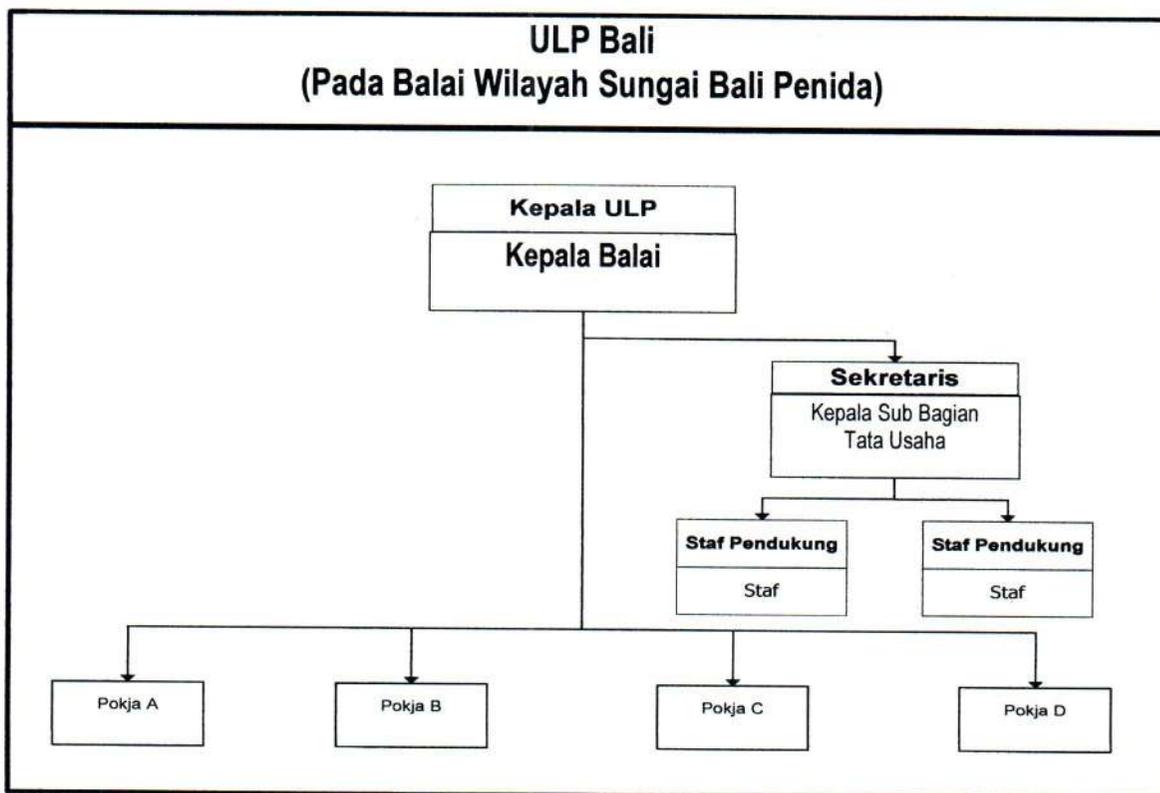
24. ULP Kalimantan Timur



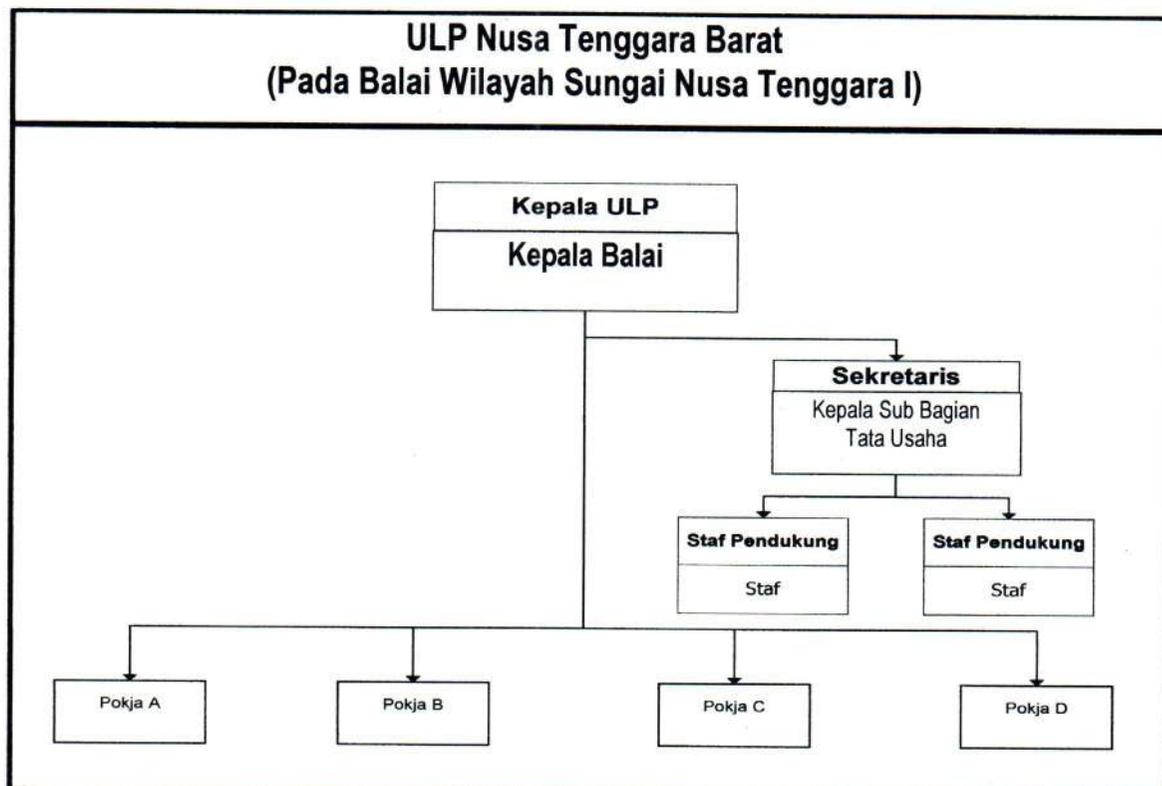
25. ULP Kalimantan Utara



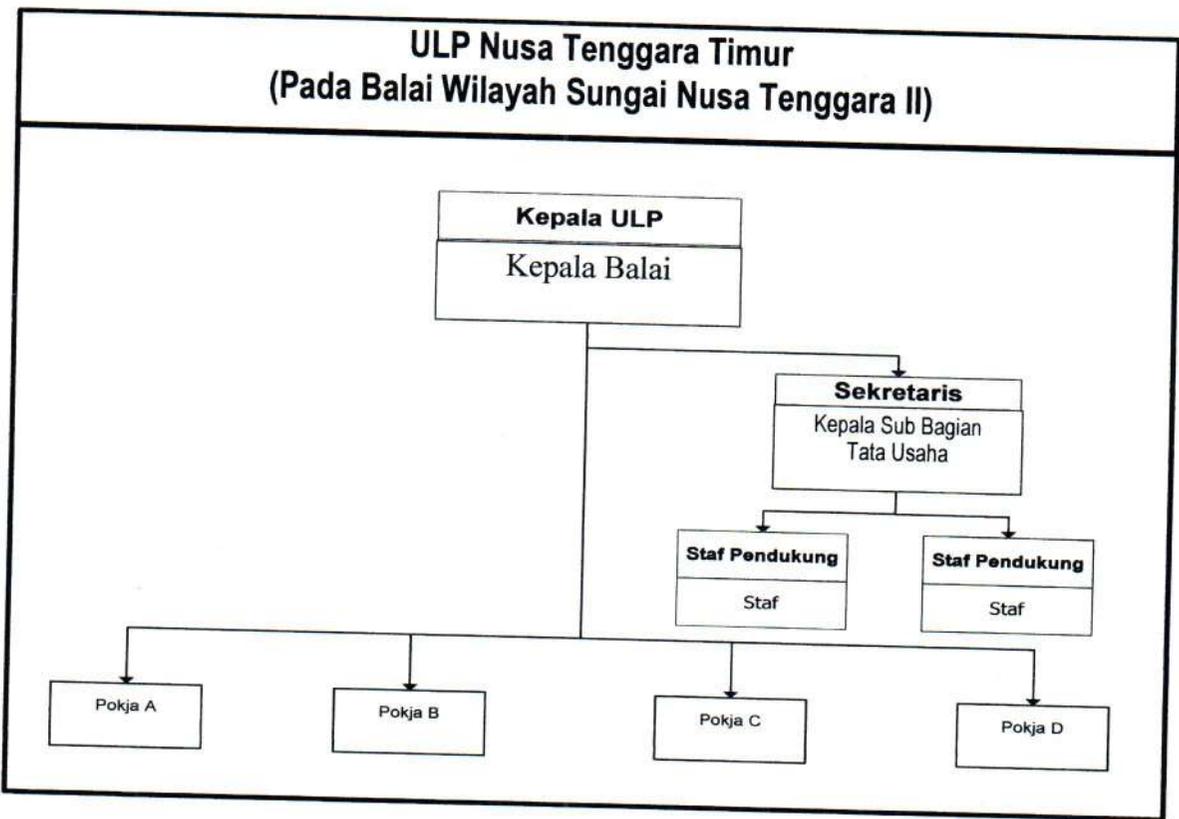
26. ULP Bali



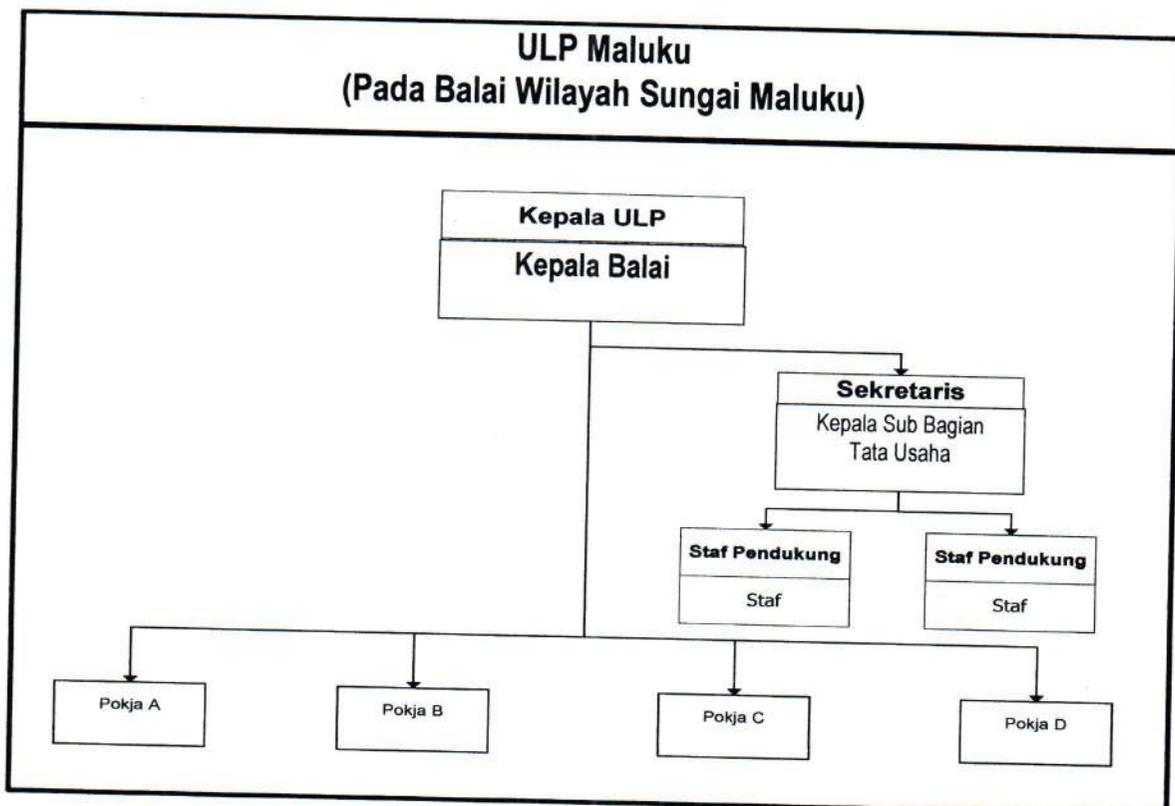
27. ULP Nusa Tenggara Barat



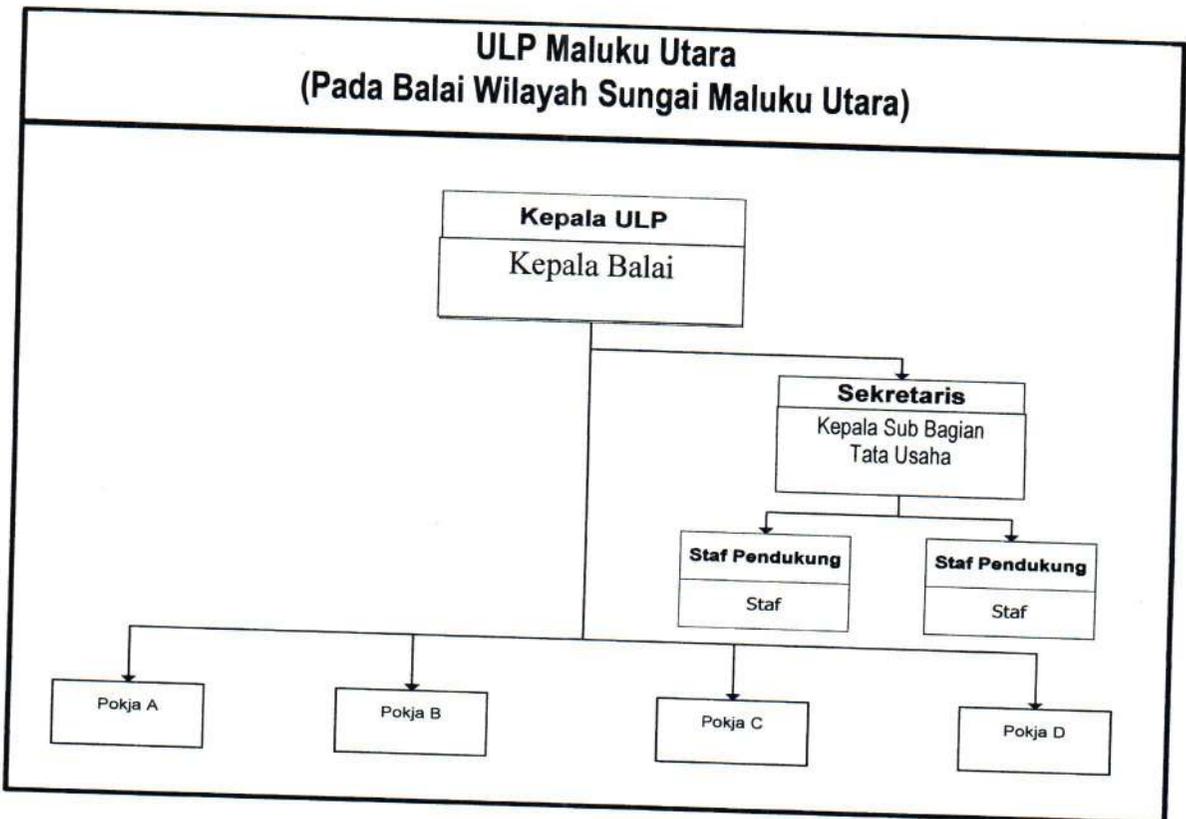
28. ULP Nusa Tenggara Timur



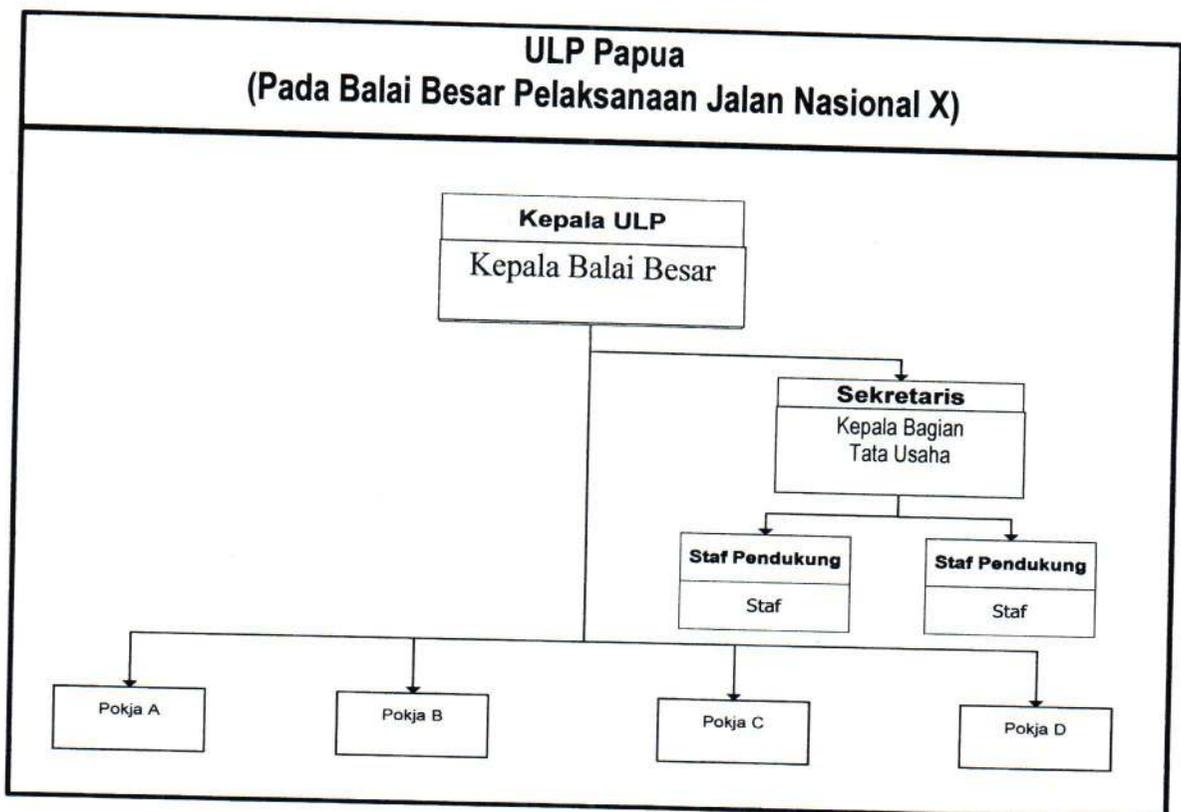
29. ULP Maluku



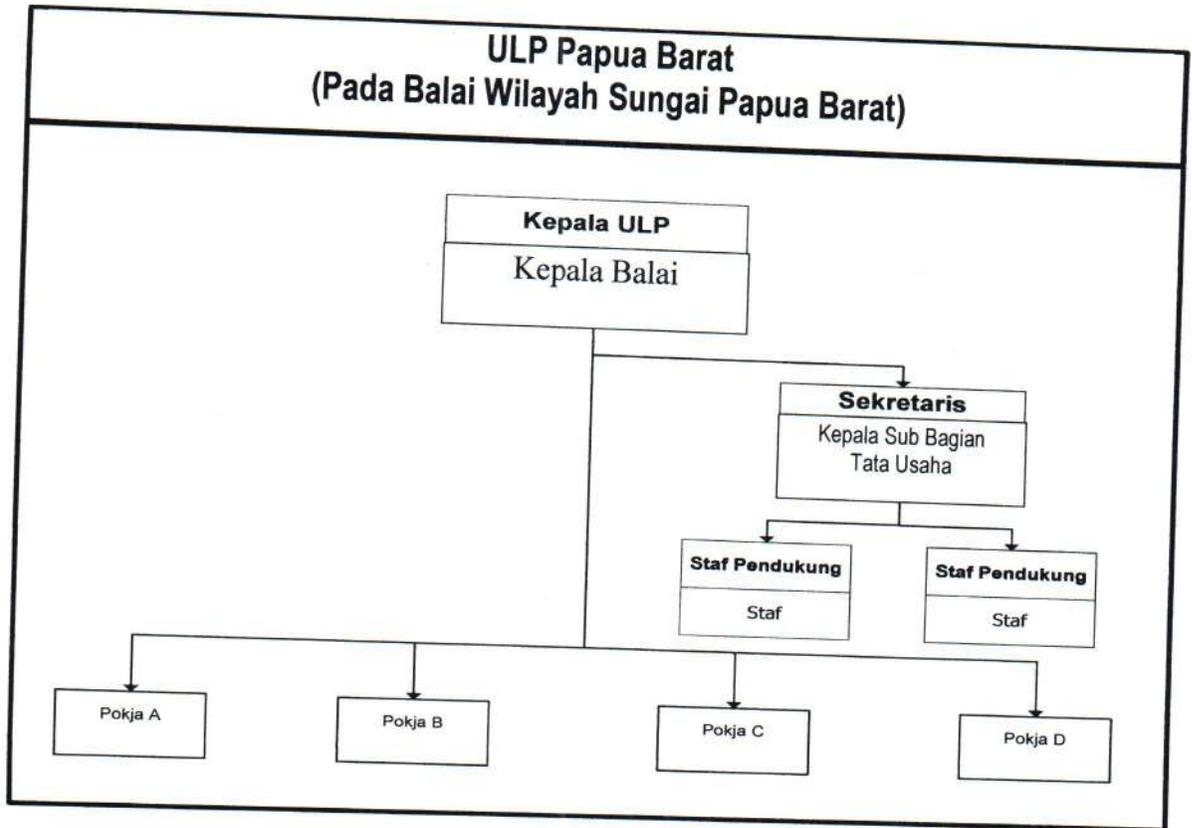
30. ULP Maluku Utara



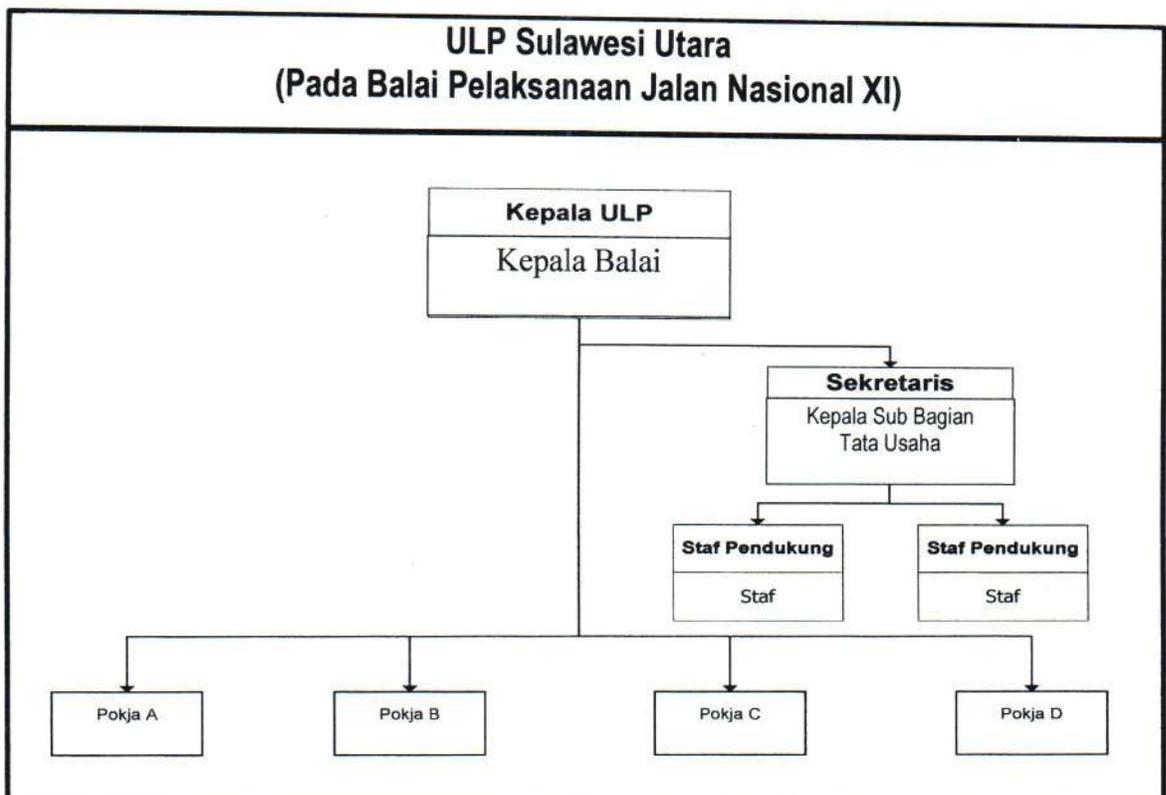
31. ULP Papua



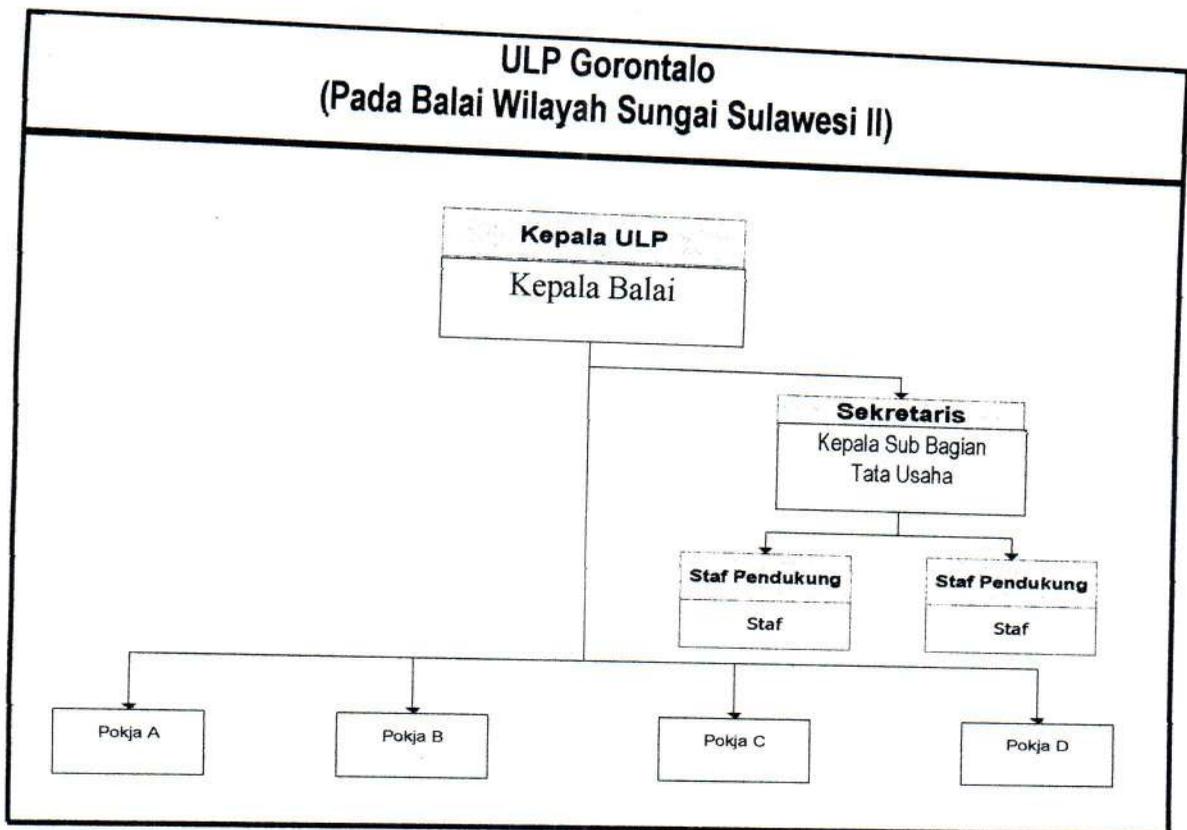
32. ULP Papua Barat



33. ULP Sulawesi Utara



34. ULP Gorontalo



## ULP Wilayah

No.	Provinsi	ULP Wilayah	Lokasi ULP
1	Nanggroe Aceh Darussal	BWS Sumatera I	Banda Aceh
2	Sumatera Utara	BBPJN I	Medan
3	Jambi	BWS Sumatera VI	Jambi
4	Kepulauan Riau	BWS Sumatera IV	Batam
5	Riau	BWS Sumatera III	Pekanbaru
6	Sumatera Barat	BWS Sumatera V	Padang
7	Bengkulu	BWS Sumatera VII	Bengkulu
8	Kep. Bangka Belitung	BBPJN III	Pangkal Pinang
9	Lampung	BBWS Mesuji Sekampung	Bandar Lampung
10	Sumatera Selatan	BBPJN III	Palembang
11	DKI. Jakarta	BBWS Ciliwung Cisadane	Jakarta
12	Banten	BBWS Cidanau Ciujung Cidurian	Serang
13	Jawa Barat	BBWS Citarum	Bandung
14	D.I. Yogyakarta	BBWS Serayu Opak	Yogyakarta
15	Jawa Tengah	BBWS Bengawan Solo	Surakarta
16	Jawa Timur	BBWS Brantas	Surabaya
17	Sulawesi Barat	BBPJN VI	Mamuju
18	Sulawesi Selatan	BBPJN VI	Makasar
19	Sulawesi Tengah	BWS Sulawesi III	Palu
20	Sulawesi Tenggara	BWS Sulawesi IV	Kendari
21	Kalimantan Barat	BWS Kalimantan I	Pontianak
22	Kalimantan Selatan	BBPJN VII	Banjarmasin
23	Kalimantan Tengah	BWS Kalimantan II	Kuala Kapuas
24	Kalimantan Timur	BWS Kalimantan III	Samarinda
25	Kalimantan Utara	BWS Kalimantan III	Tarakan
26	Bali	BWS Bali Penida	Denpasar
27	Nusa Tenggara Barat	BWS Nusa Tenggara I	Mataram
28	Nusa Tenggara Timur	BWS Nusa Tenggara II	Kupang
29	Maluku	BWS Maluku	Ambon
30	Maluku Utara	BWS Maluku Utara	Ternate
31	Papua	BBPJN X	Jayapura
32	Papua Barat	BWS Papua Barat	Manokwari
33	Sulawesi Utara	BPJN XI	Manado
34	Gorontalo	BWS Sulawesi II	Gorontalo